



## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1. Informasi Umum.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka terbentuklah Dinas-Dinas di Provinsi Sumatera Barat, salah satunya adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Visi dan Misi Dinas Sosial sebagai berikut :

##### **A. Visi.**

Pembangunan kesejahteraan sosial pada kurun waktu 5 tahun ke depan (2016-2021) dilaksanakan berdasarkan pada visi “ **Terwujudnya keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menuju Sumatera Barat yang Sejahtera** “. Visi ini mengandung makna bahwa pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga masyarakat Sumatera Barat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS), agar memiliki hak hidup, hak mendapatkan penghasilan, penghidupan yang layak, perlakuan yang baik, serta pengakuan dan perlindungan sosial sehingga tercapainya tingkat keadilan dan pemerataan pembangunan kesejahteraan sosial baik bagi individu, keluarga, maupun komunitas lokal menuju masyarakat yang semakin sejahtera.

##### **B. Misi.**

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat men-capai hasil yang optimal sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula misi sebagai berikut :



1. Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial, pengetahuan, keterampilan dan manajemen berusaha kepada PMKS.
2. Meningkatkan Profesionalisme dan kualitas pelaku pembangunan dibidang usaha kesejahteraan sosial melalui tanggung jawab sosial.
3. Mengembangkan Sistem Jaminan dan Perlindungan Sosial.

#### **C. Tujuan**

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Dinas

Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021, adalah :

1. Meningkatkan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan perlindungan dan jaminan.

#### **D. Sasaran**

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat

Selama masa periode RPJMD tahap kedua (2016-2021), adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial
3. Terwujudnya pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

4. Terwujudnya pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan Kesejahteraan Sosial.

#### **E. Strategi**

1. Peningkatan dan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
2. Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan bantuan bagi LKS.
4. Pemantapan dan pembinaan PSKS secara proaktif, koordinatif dan saling mendukung dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
5. Peningkatan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga.
6. Pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### **F. Kebijakan.**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, pembangunan bidang kesejahteraan sosial diarahkan kepada :

1. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana

dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

2. Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk :
  - a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi
  - b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
3. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :
  - a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
  - b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui : peningkatan kemandirian dan kemampuan; penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.
  - c. Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui; bantuan sosial; advokasi sosial dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Memperhatikan hal tersebut di atas maka kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial tahun 2016 – 2021 diarahkan untuk :

1. Memberikan pelayanan dan bantuan stimulan UEP, bantuan sosial lainnya, serta penguatan modal usaha baik perorangan, keluarga, kelompok / komunitas maupun masyarakat.
2. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PMKS.
3. Membuat aturan khusus tentang Standar Pelayanan oleh LKS.
4. Pengembangan kemampuan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi tenaga yang profesional dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Pengembangan perlindungan dan jaminan sosial serta strategi pendayagunaan sumber dana sosial.
6. Pengelolaan Sumber Dana Sosial untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

## **1.2 Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.**

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem

pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2017. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan,
- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran,
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

### 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2017 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 .
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan .
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 82 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .

#### **1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas , Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2017 meliputi hal-hal berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

**BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

- 3.1. Ekonomi Makro
- 3.2. Kebijakan Keuangan
- 3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

**BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

**BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

**BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 5.1.1. Pendapatan LRA
  - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
  - 5.2.1. Aset
  - 5.2.2. Kewajiban
  - 5.2.3. Ekuitas Dana



5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.3.1. Pendapatan LO

5.3.2. Beban

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul  
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan  
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

**BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

**BAB VII. PENUTUP**

**BAB II**



### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

#### TARGET KINERJA APBD

#### 2.1 Ekonomi Makro

Tujuan Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan setiap tahunnya, antara lain meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kepedulian serta partisipasi sosial masyarakat dalam pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Sesuai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial, dimana sasaran program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Aksesibilitas yang Memadai bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Peningkatan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Tersedianya perumahan yang layak bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT).
4. Penataan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berkompetensi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota, maka Pembangunan Kesejahteraan Sosial diarahkan kepada Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial.

#### 2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2017 meliputi hal berikut :

##### 2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat salah satu Dinas yang tidak mempunyai pendapatan sesuai peraturan yang ditetapkan. Disamping hal tersebut juga tidak mempunyai pendapatan yang lain-lain yang dianggap sah.

### 2.2.2. Kebijakan Umum pada Aspek Belanja Daerah

Kebijakan di bidang pengeluaran yang dilaksanakan dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja baik belanja tidak langsung dan belanja langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dalam upaya optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
- Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada Program dan Kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatnya perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja Program dan Kegiatan.

### 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Adapun sasaran yang akan dicapai dari peningkatan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial dalam tahun 2017, adalah :

1. Meningkatkan pelayanan terhadap penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta partisipasi aktif masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial.
2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anak terlantar serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial anak terlantar.
3. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Penyandang Cacat dan eks trauma melalui Bimbingan dan Pelatihan, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial penyandang cacat trauma.
4. Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penyandang masalah sosial jompo / lanjut usia terlantar, anak terlantar, penyandang cacat serta penyandang tuna sosial.

5. Meningkatnya kemampuan bagi penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya),
6. Tersosialisasikannya kegiatan-kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Sumatera barat.
7. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Fakir Miskin, Keluarga Rentan, Komunitas Adat Terpencil, Korban Tindak kekerasan dan Pekerja Migran, serta terpenuhinya kebutuhan dasar (kebutuhan beras) bagi anak panti asuhan swasta.
8. Terpeliharanya Monumen dan Taman Makan Pahlawan Kusuma Negara Padang selama tahun anggaran 2017.

Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat melaksanakan beberapa program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dimana dalam tahun anggaran 2017 terdapat perubahan di beberapa program/kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dengan capaian target kinerja sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Target Kinerja
<b>A</b>	<b>Program Administrasi Perkantoran terdiri dari :</b>	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kelancaran administrasi Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan
2.	Penyediaan jasa Komonikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan
3.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.
4.	Penyediaan jasa kebersihan , pengamanan dan sopir kantor	Tersedianya jasa kebersihan, pengamanan dan sopir Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk Dinas Sosial



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

		dan 8 UPTD selama 12 bulan.
6.	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan
7.	Penyediaan komponen Instalasi listrik /penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan keperluan pegawai Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.
10.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan bahan logistik Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.
11.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedia dan terlaksananya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.
12.	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial dan 8 UPTD serta instansi/lembaga terkait secara baik selama 12 bulan.
13.	Penyediaan jasa Informasi , Dokumentasi dan Publikasi	Terinformasikan dan terpublikasikannya kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan kepada penerima masyarakat luas.
14.	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terpeliharanya Kesehatan mental Spritual Aparatur Dinas Sosial dan 8 UPTD
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	
1.	Pengadaan Kendaraan	Tersedianyan pengadaan mobil 3 buah dan



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

	dinas/operasional	motor 1 buah Dinas Sosial dan 8 UPTD.
2.	Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pengadaan plang kantor 1 unit, AC 15 unit, kipas angin besar 1 unit, kipas baling-baling 2 unit, televisi 2 unit, untuk Dinas Sosial dan 8 UPTD.
3.	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya pengadaan tempat tidur 63 unit, lemari 2 pintu 10 unit, lemari arsip 4 buah, meja makan 4 buah, kursi aula 150 unit, lemari pakaian 1 unit, meja receptionis 1 unit, untuk Dinas Sosial dan 8 UPTD.
4.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pengadaan genset 1 unit, mesin potong rumput 2 unit, mesin jahit 1 unit, rak piring 3 buah, tempat sampah 2 set, pemanas air tenaga surya 1 unit, receiver digital+antena parabola 2 set, jaringan CCTV 1 paket, tape mobil 1 set, pengadaan buku perpustakaan, untuk Dinas Sosial dan 8 UPTD.
5.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor .	Terpeliharanya gedung kantor Dinas Sosial dan 8 UPTD.
6.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya 1 unit kendaraan dinas jabatan Dinas Sosial.
7.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Dinas Sosial dan 8 UPTD sebanyak 5 unit roda 6, 18 unit roda 4, 10 unit roda 2, 3 unit roda 3.
8.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya secara rutin dan berkala peralatan dan perlengkapan Kantor Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.
9.	Pemeliharaan Rutin /Berkala monumen dan bangunan sejarah	Terpeliharanya monumen TMP di 4 lokasi Kabupaten/kota selama 12 bulan.





## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

10.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi dan Jaringan	Terpeliharanya instalasi listrik, telepon dan air untuk Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan
11.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Sosial dan 8 UPTD.
12.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi, dan Alat Informasi	Terpeliharanya Alat Studio , Alat Komunikasi dan Alat Informasi yang terdiri dari 5 unit telepon/faximile, 5 unit alat musik/sound system, 3 unit TV, 5 unit handycam/kamera SLR, 1 unit organ, 1 unit jaringan internet, 60 unit stasiun repiter/REG/HT.
13.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terpeliharanya komputer dan jaringan komputerisasi sebanyak 122 unit untuk Dinas Sosial dan 8 UPTD.
14.	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya komputer dan jaringan komputerisasi yang terdiri dari 4 unit laptop, 5 unit komputer, 4 unit printer, 1 paket CCTV lengkap untuk Dinas Sosial dan 8 UPTD.
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	
1.	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas Pegawai sebanyak 236 stel dan meningkatnya kesejahteraan Pegawai Dinas Sosial dan 8 UPTD sebanyak 236 orang.
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan/Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Sosial dan 8 UPTD
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	
1.	Penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi	Tersusunnya laporan Kinerja Dinas Sosial yang terdiri dari laporan tahunan APBD, laporan



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

	Kinerja SKPD	tahunan APBN, LAKIP, LKJP dan LPPD secara tertib, lancar dan berkala selama 1 tahun
2.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Meningkatnya motivasi kerja Pengelola Keuangan Dinas Sosial dan 8 UPTD serta terlaksananya penatausahaan keuangan secara baik dan tertib.
<b>F</b>	<b>Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset</b>	
1.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan yang terdiri dari Renja, Pra-RKA, DPA, DPA Pergeseran dan DPPA Dinas Sosial dan UPTD.
2.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	Termonitor dan terevaluasinya pelaksanaan program kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan di Kab/Kota
3.	Pengelolaan , Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terlaksananya pengelola asset Dinas Sosial dan 8 UPTD dengan baik.
4.	Penyusunan Sinergitas Program antar Kabupaten/Kota	Tersusunnya sinergitas program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan kab/kota.
<b>G</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	
1.	Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terlaksananya Koordinasi, evaluasi tentang Pengiriman Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial kab/kota se-Sumbar.
2.	Penyusunan peraturan Gubernur dan Sosialisasi Perda Disabilitas	Tersusunnya Pergub tentang Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas dan tersosialisasikan Perda Disabilitas.
3.	Pemantapan Satuan Bhakti Pekerja Sosial	Meningkatnya pemantapan pekerja sosial dalam menjalankan UKS dilingkungan Dinas Sosial dan 8 UPTD.



H	Program Pembinaan Anak Terlantar	
1.	Pengadaan kelengkapan Kelayan	Terpenuhinya kelengkapan klien di UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dan PSBR Harapan Padang Panjang sebanyak 355 orang
2.	Seleksi Penerimaan Calon Kelayan	Terlaksananya penerimaan calon kelayan di UPTD Dinas sosial.
3.	Pelatihan keterampilan dan Praktek Belajar kerja bagi Anak terlantar melalui UPTD PSAABR Lubuk Alung	Meningkatnya keterampilan anak terlantar yang telah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi melalui UPTD PSAABR Lubuk Alung sebanyak 160 orang
4.	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti (Budi Utama)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi penghuni panti di PSAABR Budi Utama Lubuk Alung sebanyak 75 orang
5.	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar kerja bagi Anak Terlantar PSBR Harapan Padang Panjang	Meningkatnya keterampilan anak terlantar yang telah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi melalui UPTD PSBR Harapan Padang Panjang sebanyak 200 orang
6.	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti (Tri Murni)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi penghuni panti di Tri Murni Padang Panjang sebanyak 100 orang
7.	Biaya Pendidikan Klien (Tri Murni)	Terpenuhinya biaya pendidikan klien anak terlantar di UPTD Tri Murni Padang Panjang sebanyak 100 orang
8.	Penyediaan bahan Obat-obatan Dokter Habis Pakai	Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan klien di PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dan PSBR Harapan Padang Panjang selama 12 bulan
9.	Penyediaan Bahan Pendidikan	Terpenuhinya bahan pendidikan kelayan PSAABR Budi Utama Lubuk Alung sebanyak 75 orang



10.	Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak	Terjalannya koordinasi antar pengurus panti sosial swasta dengan Dinas Sosial Kab/Kota dan Instansi terkait tentang penanganan perlindungan anak.
11.	Pengadaan Makan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kelayan PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dan PSBR Harapan Padang Panjang selama 12 bulan sebanyak 435 orang (155 laki-laki, 280 perempuan)
12.	Sehari bersama Anak	Meningkatnya kepedulian orang tua dan masyarakat terhadap anak
13.	Tim PIPA ( Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	Terjalannya koordinasi dengan instansi terkait dalam izin pengangkatan anak
<b>I</b>	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas dan Eks Trauma</b>	
1.	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Dissabilitas	Meningkatnya pengetahuan dan kemandirian penyandang cacat/dissabilitas yang telah mendapatkan pendidikan, pelayanan dan rehabilitasi di UPTD PSBN Tuah Sakato Padang sebanyak 50 orang (36 laki-laki, 14 perempuan)
2.	Biaya Makan dan Minum Kelayan.	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kelayan penyandang cacat di UPTD PSBN Tuah Sakato dan PSBGHI Padang sebanyak 150 orang selama 12 bulan.
4.	Penyediaan bahan Obat-obatan dan dokter Pakai Habis	Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan klien di PSBN Tuah Sakato Padang dan PSBGHI Padang selama 12 bulan.
5.	Biaya kelengkapan kelayan	Terpenuhinya kelengkapan kelayan di PSBN Tuah Sakato Padang dan PSBGHI Padang sebanyak 150 orang selama 12 bulan.



6.	Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat (JSPC)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pendamping program jaminan sosial lanjut usia terhadap program kerja pendamping sebanyak 66 orang petugas Dinas Sosial dan Pendamping Cacat Berat/Difabel.
7.	Pendayagunaan para Penyandang Disabilitas	Meningkatnya kemandirian serta keberfungsian Sosial Penyandang disabilitas yang telah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi melalui UPTD PSBGHI Padang sebanyak 100 orang.
8.	Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas	Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas
<b>J</b>	<b>Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Lansia</b>	
1.	Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni Panti Jompo	Meningkatnya kemandirian dan fungsi sosial lanjut usia yang telah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan Kasih Sayang Ibu Batu Sangkar sebanyak 180 orang ( 106 laki-laki, 74 perempuan).
2.	Biaya Kelengkapan Klien di Panti Jompo	Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan kelayan lanjut usia di PSTW Kasih Sayang Ibu dan Sabai Nan Aluih Sicincin sebanyak 180 orang ( 106 laki-laki, 74 perempuan).
3.	Biaya Makan dan Minum Kelayan di Panti Jompo	Terpenuhinya kebutuhan Makan dan Minum kelayan Jompo di PSTW Kasih Sayang Ibu Batu Sangkar dan Sabai Nan Aluih Sicincin sebanyak 180 orang ( 106 laki-laki, 74 perempuan).
4.	Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter pakai habis	Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan kelayan di PSTW Kasih Sayang Ibu Bt.Sangkar dan PSTW



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

		Sabai Nan Aluih Sicincin selama 12 bulan
5.	Biaya Jasa Penguburan/ Pemulangan Klien	Terlaksananya Pemakaman dan Pemulangan kelayan di UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan Kasih Sayang Ibu Batu Sangkar selama 12 bulan
6.	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pendamping program jaminan sosial lanjut usia sesuai program kerja sebanyak 85 orang
7.	Lanjut Usia Berkreasi	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lanjut usia sebanyak 250 orang.
<b>K</b>	<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana, PSK, dan Penyakit Sosial lainnya)</b>	
1.	Pengadaan Kelengkapan kelayan	Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan klien di UPTD PSKW Andam Dewi Sukarami Solok sebanyak 40 orang
2.	Biaya Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis	Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan di UPTD PSKW Andam Dewi Sukarami Solok selama 1 tahun
3.	Pengadaan Makan dan Minum	Terpenuhinya kebutuhan Makan dan Minum klien di PSKW Andam Dewi Solok sebanyak 40 orang.
4.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Eks Penyakit Sosial	Meningkatnya keterampilan klien yang telah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di PSKW Andam Dewi Solok sebanyak 40 orang.



L Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		
1.	Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	Terinformasikannya tentang program pembangunan kesejahteraan sosial kepada masyarakat melalui 4 media cetak, 8 media elektronik dan 1 kali melalui TV.
2.	Bimbingan bagi Pengurus Orsos Se-Sumatera Barat	Meningkatnya Pengetahuan Pengurus Orsos dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat sebanyak 50 orang
3.	Penilaian PSKS ( KT, Orsos, PSM, TSKS berprestasi Tingkat Sumatera Barat	Terseleksinya PSKS yang berprestasi Tingkat Provinsi untuk diseleksi ke Tingkat Nasional serta meningkatnya motivasi kerja PSKS dalam menangani PMKS sebanyak 50 orang
4.	KSN Expo dan Awards dalam HKS tahun 2017.	Terpublikasikannya kepada masyarakat umum tentang pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan dan terjalannya koordinasi dengan mitra kerja pelaksana program pembangunan kesejahteraan sosial
6.	Penguatan Nilai-nilai KSN	Terpenuhinya penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial nasional (KSN) sebanyak 800 orang
7.	Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat	Termotivasinya Pengurus LKKS Provinsi dan Kab/Kota dalam Membina dan Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial di Kab/Kota sebanyak 65 orang.
8.	Penguatan peran LKS Posdaya dalam penanggulangan kemiskinan dan Sustainable Development Goals (SDGs)	Termotivasinya pengurus pos pemberdayaan keluarga dalam penanggulangan kemiskinan sebanyak 80 orang dan 8 Lokasi.



9.	Bimbingan jejaringan Kerja LKS/Orsos se-Sumatera Barat dalam rangka akreditasi	Termotivasinya pengurus organisasi sosial untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan kesiapan akreditasi sebanyak 40 orang
10.	Bimbingan kapasitas bagi tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan se Sumatera Barat	Termotivasinya TKS untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat sebanyak 50 orang
11.	Pertemuan pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	Termodifikasinya pengurus Karang taruna untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat sebanyak 50 orang
12.	Bimbingan kapasitas bagi pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	Termodifikasinya pengurus Karang taruna untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat sebanyak 330 orang
13.	Pertemuan Forum Komunitas Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) se-Sumatera Barat	Terinformasikannya program pembangunan kesejahteraan kepada masyarakat sebanyak 35 orang
14.	Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	Terinformasikannya program lanjutan pembangunan kesejahteraan sosial kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 30 orang
<b>M</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b>	
1.	Bimbingan Motivasi Sosial/ Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin (dalam rangka Harganas).	Meningkatnya pengetahuan dan motivasi berusaha bagi keluarga rentan miskin sebanyak 50 kk.
2.	Pengadaan beras untuk Panti Swasta	Terpenuhinya kebutuhan pangan kelayan dalam panti sosial swasta se Sumbar sebanyak 4000 orang.





3.	Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE Fakir Miskin	Meningkatnya pengetahuan pendamping KUBE Fakir Miskin dalam mengelola bantuan yang akan diterima dan berkembang usahanya sebanyak 38 orang
4.	Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3.	Meningkatkan pengetahuan dan Profesionalisme pengurus LK 3 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penanganan permasalahan sosial sebanyak 46 orang pengurus
5.	Rapat koordinasi tingkat Provinsi program keluarga harapan	Terkoordinasinya PKH diantara dinas/instansi yang terkait sebanyak 40 orang.
6.	Pertemuan pendamping dan operator program keluarga harapan (PKH)	Meningkatnya kinerja pendamping dan operator dalam kelancaran pelaksanaan PKH sebanyak 38 orang.
7.	Pemberdayaan usaha ekonomi produktif (UEP) korban tindak kekerasan	Terpenuhinya kebutuhan hidup para korban tindak kekerasan melalui bantuan UEP KUBE Kab/Kota se Sumatera Barat.
8.	Asistensi Pengembangan UEP Korban Pekerja Migran	Meningkatnya kemampuan berusaha penerima bantuan UEP Pekerja Migran dan terlaksananya pemulangan orang terlantar ketempat asal dari Kab/Kota secara berkelanjutan se Sumatera Barat.
9.	Pelayanan orang terlantar	Meningkatnya peran paguyuban dan pemulangan orang terlantar sebanyak 50orang.
10.	Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi	Terseleksinya KUBE berprestasi terhadap 19 orang pengurus KUBE dan 19 orang Pendamping KUBE serta meningkatnya motivasi kerja KUBE dalam melakukan usaha



		kelompok.
11.	Bantuan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Meningkatnya pengetahuan keluarga miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 18 kelompok usaha.
12.	Bimbingan Keterampilan Berusaha Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sebanyak 440 orang
13.	Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan berusaha warga Komunitas Adat Terpencil dalam mengembangkan usahanya sebanyak 30 KK.
14.	Penerapan calon lokasi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Direkomendasikan calon pemberdayaan KAT tahun 2018.
15.	Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) PFM Perkotaan	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman aparaturnya tentang bantuan pangan Non Tunai (BPNT) PFM perkotaan sebanyak 40 orang di 19 Kab/kota di Sumatera Barat
16.	Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi Data PBDT	Meningkatnya pemahaman Tim Verifikasi dan Validasi data PBDT sebanyak 525 di 7 Lokasi.
<b>N</b>	<b>Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial</b>	
1.	Bimtek Pengendalian dan Pendamping Askesos.	Meningkatnya pemahaman Tim Pengendali dan Pendamping Askesos sebanyak 30 orang serta terciptanya manajemen Pengelola Askesos yang baik.
2.	Sosialisasi psikososial korban bencana	Meningkatnya pemahaman 36 orang Tim psikososial dalam rangka pemulihan korban bencana.
3.	Rapat koordinasi pembentukan Tim	Meningkatnya pemahaman 36 orang Tim



	Reaksi Cepat penanganan bencana	Reaksi Cepat dalam menanggulangi/mengatasi bencana.
4.	Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)	Meningkatnya pemahaman 40 orang Tim pengendali dan pendamping Askesos tentang UGB.
<b>O</b>	<b>Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba</b>	
1.	Bimbingan pelatihan keterampilan dan bimbingan sosial korban NAPZA/HIV/AIDS	Meningkatnya pengetahuan dan fungsi sosial eks korban Napza dalam mengem-bangkan usaha sebanyak 20 orang
2.	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	Meningkatnya pengetahuan siswa/pelajar tentang penanggulangan narkoba dan penyandang masalah sosial sebanyak 150 orang
3.	Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza	Meningkatnya pengetahuan peserta tentang pelaksanaan rehabilitasi Sosial Berbasiskan Masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial korban Penyalah-gunaan Napza sebanyak 30 orang.

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

##### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pada Tahun anggaran 2017 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 52.784.515.122,-** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp. 19.074.400.000,-**, dan belanja langsung sebesar **Rp. 33.710.115.122,-**.

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sampai dengan bulan Desember tahun 2017, dapat diuraikan sebagai berikut :

Dari total pagu sebesar **Rp. 52.784.515.122,-** terealisasi sampai akhir Desember 2017 sebesar **Rp. 49.879.182.307,-** atau sebesar **94,50 %**. Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja	Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Belanja Tidak Langsung	19.074.400.000,-	18.532.594.292,-	97,16
2	Belanja Langsung	33.710.115.122,-	31.346.588.015,-	92,22
	<b>Jumlah.....</b>	<b>52.784.515.122,-</b>	<b>49.879.182.307,-</b>	<b>94,50</b>

Berdasarkan Jenis Belanja dapat dilihat realisasinya sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Jumlah		Realisasi
-	Belanja Pegawai	Rp.	18.532.594.292,-	97,16 %
-	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	27.649.558.840,-	92,49 %
-	Belanja Modal	Rp.	3.697.029.175,-	96,93 %
	<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>49.879.182.307,-</b>	<b>94,50 %</b>

Secara total target realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, sudah memakai prinsip 3E (Efektif, Effisien dan Ekonomis).

### 3.2. Belanja Daerah

Dari total dana sebesar **Rp. 52.784.515.122,-** semuanya merupakan dana yang diperuntukan untuk belanja daerah, yang terdiri dari :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% Realisasi
I.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 19.074.400.000,-	Rp. 18.532.594.292,-	97,16
1.	Gaji dan Tunjangan	Rp. 14.153.000.000,-	Rp. 13.774.430.549,-	97,33
2.	Tambahan Penghasilan	Rp. 4.921.400.000,-	Rp. 4.758.163.743,-	96,68
II.	Belanja Langsung	Rp. 33.710.115.122,-	Rp. 31.346.588.015,-	92,99
1.	Bel. Langsung Umum	Rp. 11.853.304.670,-	Rp. 11.352.360.670,-	95,77
2.	Belanja Langsung Wajib	Rp. 21.856.810.452,-	Rp. 19.994.227.345,-	91,48

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% Realisasi
I.	Belanja Pegawai	Rp. 19.074.400.000,-	Rp. 18.532.594.292,-	97,16
II.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 29.896.022.122,-	Rp. 27.649.558.840,-	92,49
III.	Belanja Modal	Rp. 3.814.093.000,-	Rp. 3.697.029.175,-	96,93

Untuk lebih rincinya capaian target kinerja keuangan menurut program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	%
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>5.586.908.825,-</b>	<b>5.282.363.273,-</b>	<b>94,55</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	68.888.094,-	68.862.650,-	99,96
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	854.610.000,-	635.513.130,-	74,36
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	362.534.932,-	358.830.568,-	98,98
4	Penyediaan jasa kebersihan , pengamanan dan sopir kantor	1.989.721.856,-	1.966.698.561,-	98,84
5	Penyediaan alat tulis kantor	142.450.844,-	142.280.481,-	99,88
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	86.329.590,-	86.177.170,-	99,82
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	144.400.626,-	142.715.408,-	98,83
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	309.664.617,-	305.187.617,-	98,55
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	56.206.025,-	55.211.025,-	98,23
10	Penyediaan bahan logistik kantor	379.307.600,-	378.122.750,-	99,69
11	Penyediaan makanan dan minuman	145.960.000,-	142.060.000,-	97,33
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	758.196.400,-	742.434.229,-	97,92
13	Penyediaan Jasa Informasi, dokumentasi dan Publikasi	200.963.241,-	173.844.684,-	86,51
14	Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur	87.675.000,-	84.425.000,-	96,29
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>4.989.283.000,-</b>	<b>4.847.072.867,-</b>	<b>75,74</b>
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	960.000.000,-	893.988.775,-	93,12
2	Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	115.500.000,-	115.350.000,-	99,87
3	Pengadaan meubelier	505.000.000,-	498.743.000,-	98,76
4	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	858.850.000,-	849.422.000,-	98,90
5	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	301.342.000,-	299.900.000,-	99,52



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

6	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	18.200.000,-	15.059.950,-	82,75
7	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	228.575.000,-	215.303.942,-	94,19
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	39.572.000,-	37.078.000,-	93,70
9	Pemeliharaan rutin/berkala monumen dan bangunan sejarah	89.385.000,-	89.349.800,-	99,96
10	Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi dan jaringan	54.917.000,-	44.917.000,-	81,79
11	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	1.596.800.000,-	1.567.507.000,-	98,17
12	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	26.721.000,-	26.467.000,-	99,05
13	Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan jaringan komputerisasi	66.248.000,-	66.243.000,-	99,99
14	Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	128.173.000,-	127.743.400,-	99,99
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>151.750.000,-</b>	<b>146.443.000,-</b>	<b>96,50</b>
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	151.750.000,-	146.443.000,-	96,50
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>51.326.000,-</b>	<b>44.509.000,-</b>	<b>86,72</b>
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	51.326.000,-	44.509.000,-	86,72
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>546.336.400,-</b>	<b>536.272.625,-</b>	<b>98,16</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD	39.112.400,-	39.112.400,-	100
2	Penatausahaan keuangan SKPD	507.224.000,-	497.160.225,-	98,02
<b>F</b>	<b>Program Perencanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Kegiatan dan Asset</b>	<b>527.700.445,-</b>	<b>495.699.905,-</b>	<b>93,94</b>
1	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	159.367.654,-	146.475.155,-	91,91
2	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	155.399.791,-	146.041.750,-	93,98
3	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	153.490.000,-	144.140.000,-	93,91
4	Penyusunan sinergitas program antar kabupaten/kota	59.443.000,-	59.043.000,-	99,33
<b>G</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>198.096.710,-</b>	<b>165.730.010,-</b>	<b>83,66</b>



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

1	Rujukan penyandang masalah kesejahteraan sosial	95.110.460,-	78.165.760,-	82,18
2	Penyusunan peraturan gubernur dan sosialisasi Perda Disabilitas	47.702.600,-	36.702.600,-	76,94
3	Pemantapan satuan bhakti pekerja sosial	55.283.650,-	50.861.650,-	92,00
<b>H</b>	<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>	<b>7.158.605.627,-</b>	<b>7.085.430.353,-</b>	<b>98,98</b>
1	Pengadaan Kelengkapan Klien	852.065.000,-	848.469.000,-	99,58
2	Seleksi Penerimaan Calon Kelayan	60.940.000,-	60.259.475,-	98,88
3	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar (PSAABR Budi utama Lb.Alung)	582.229.500,-	579.540.000,-	99,54
4	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (PSAABR Budi utama Lb.Alung)	239.150.000,-	238.650.000,-	99,79
5	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar (PSBR Harapan Padang Panjang)	800.816.800,-	798.375.956,-	99,70
6	Pendidikan dan pelatihan bagi Penghuni Panti (PSAA Tri Murni Padang Panjang)	488.992.394,-	486.064.406,-	99,40
7	Biaya Pendidikan Klien (PSAA Tri Murni Padang Panjang)	441.790.050,-	411.817.000,-	93,22
8	Penyediaan obat-obatan dan dokter pakai habis	24.708.000,-	24.708.000,-	100
9	Penyediaan pendidikan klien (PSAABR Budi utama Lb.Alung)	204.920.000,-	204.532.000,-	99,81
10	Rapat koordinasi Pelayanan Rehabilitasi Kesos Anak	158.824.950,-	152.454.950,-	95,99
11	Pengadaan makanan dan minuman	3.237.621.333,-	3.227.871.966,-	99,70
12	Sehari bersama anak	26.528.700,-	26.528.700,-	100
13	Tim PIPA ( Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	40.018.900,-	26.158.900,-	65,37
<b>I</b>	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas dan Eks Trauma</b>	<b>2.933.120.340,-</b>	<b>2.920.053.788,-</b>	<b>99,95</b>
1	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas	541.293.100,-	539.054.100,-	99,59





## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

2	Biaya Makanan dan Minuman kelayan	1.461.096.940,-	1.452.064.988,-	99,38
3	Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis	28.660.300,-	28.552.450,-	99,62
4	Biaya Kelengkapan kelayan	340.559.000,-	339.121.750,-	99,58
5	Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat (JSPC)	83.675.300,-	83.495.300,-	99,78
6	Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas	460.718.300,-	460.647.800,-	99,98
7	Penguatan motivasi penyandang disabilitas	17.117.400,-	17.117.400,-	100
<b>J</b>	<b>Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Lansia</b>	<b>2.812.400.836,-</b>	<b>2.790.310.056,-</b>	<b>99,21</b>
1	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti jompo	609.673.752,-	602.461.860,-	98,82
2	Biaya kelengkapan klien di Panti Jompo	394.065.800,-	391.889.000,-	99,45
3	Biaya Makanan dan Minuman klien di panti Jompo	1.620.251.744,-	1.613.314.656,-	99,57
4	Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis	58.055.400,-	56.055.400,-	96,56
5	Biaya jasa penguburan/pemulangan klien	31.000.000,-	28.000.000,-	90,32
6	Bimbingan teknis dan pendampingan jaminan sosial lanjut usia	71.639.140,-	70.874.140,-	98,93
7	Lanjut usia berkreasi	27.715.000,-	27.715.000,-	100
<b>K</b>	<b>Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>	<b>951.256.498,-</b>	<b>936.541.032,-</b>	<b>98,45</b>
1	Pengadaan Kelengkapan Klien	126.270.000,-	126.226.800,-	99,97
2	Biaya Obat – obatan dan Dokter Pakai Habis	28.760.000,-	28.756.000,-	99,99
3	Pengadaan Makanan dan Minuman	441.738.248,-	428.820.982,-	97,08
4	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi Eks Penyakit Sosial	354.488.250,-	352.737.250,-	99,51
<b>L</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>1.786.927.000,-</b>	<b>1.653.818.500,-</b>	<b>92,55</b>



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

1	Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	50.000.000,-	50.000.000,-	100
2	Bimbingan pengurus organisasi Sosial se Sumatera Barat	54.492.000,-	54.492.000,-	100
3	Penilaian PSKS ( Karang Taruna ,Orsos, PSM,TKSK ) Berprestasi Tingkat Sumatera Barat	97.496.000,-	96.013.600,-	98,48
4	KSN Expo dan Award dalam HKSN tahun 2017	32.000.000,-	32.000.000,-	100
5	Penguatan nilai-nilai KSN	150.000.000,-	150.000.000,-	100
6	Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat	378.500.000,-	300.941.800,-	79,51
7	Koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan lembaga kesejahteraan sosial	186.000.000,-	144.054.100,-	77,45
8	Penguatan peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Sustainable Development Goals (SDGs)	310.500.000,-	306.963.000,-	98,86
9	Bimbingan Jejaring Kerja LKS/Orsos se Sumbar dalam rangka Akreditasi	62.670.000,-	62.270.000,-	99,36
10	Bimbingan Kapasitas bagi TKSK se-Sumbar	58.294.000,-	58.294.000,-	100
11	Pertemuan Pengurus Karang Taruna se-Sumbar	53.458.000,-	53.458.000,-	100
12	Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumbar	256.857.000,-	248.672.000,-	96,81
13	Pertemuan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) se-Sumbar	50.000.000,-	50.000.000,-	100
14	Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	46.660.000,-	46.660.000,-	100
<b>M</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kessos (PMKS) Lainnya</b>	<b>5.636.736.091,-</b>	<b>4.073.206.256,-</b>	<b>72,26</b>
1	Bimbingan Motivasi Sosial/ Keterampilan berusaha bagi Keluarga Miskin (dalam rangka Harganas)	100.099.500,-	98.849.500,-	98,75
2	Pengadaan Beras untuk Panti Swasta	2.489.459.386,-	2.488.199.386,-	99,95
3	Bimbingan pemantapan Pendampingan KUBE Fakir Miskin	89.832.500,-	89.832.500,-	100
4	Bimbingan Pemantapan Pengurus LK 3	127.555.500,-	124.353.800,-	97,49
5	Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Program Keluarga Harapan (PKH)	54.932.200,-	54.932.200,-	100
6	Pertemuan Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan	53.002.200,-	53.002.200,-	100



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

7	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Korban Tindak Kekerasan	56.600.000,-	56.580.000,-	99,96
8	Asistensi Pengembangan UEP Pekerja Migran	60.980.000,-	55.565.700,-	91,12
9	Pelayanan Orang Terlantar	18.916.800,-	18.803.300,-	99,40
10	Seleksi penghargaan (KUBE) dan Pendamping KUBE berprestasi	135.393.000,-	135.114.000,-	99,06
11	Bantuan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	531.199.750,-	505.433.750,-	95,15
12	Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	1.526.159.085,-	9.130.000,-	0,60
13	Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)	57.983.250,-	57.983.250,-	100
14	Penerapan Calon Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	123.831.500,-	123.509.200,-	99,74
15	Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) PFM Perkotaan	82.831.000,-	76.039.050,-	91,80
16	Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi data PBDT	127.960.420,-	126.878.420,-	99,15
<b>N</b>	<b>Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial</b>	<b>220.326.700,-</b>	<b>220.021.700,-</b>	<b>99,86</b>
1	Bimtek Pengendalian dan Pendamping Askesos	51.940.100,-	51.735.100,-	99,61
2	Sosialisasi Psikososial Korban Bencana	53.962.200,-	53.962.200,-	100
3	Rapat Koordinasi Pembentukan TRC Penanganan Bencana	53.962.200,-	53.962.200,-	100
4	Sosialisasi Undian Berhadiah Gratis (UGB)	60.462.200,-	60.362.200,-	99,83
<b>O</b>	<b>Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Peyalahgunaan Narkoba</b>	<b>159.340.650,-</b>	<b>149.115.650,-</b>	<b>93,58</b>
1	Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV	64.763.450,-	64.263.450,-	99,23
2	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	58.477.500,-	52.672.500,-	90,07
3	Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza	36.099.700,-	32.179.700,-	89,14

**3.3. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.**

1. Kegiatan yang tidak terlaksana sebagai berikut:

NO	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Bimbingan keterampilan berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.526.169.085,	9.130.000,-	0,60

Kegiatan ini tidak terlaksana disebabkan data yang diusulkan beberapa kali tidak sesuai dengan ketentuan atau Basis Data Terpadu (BDT), dimana Kegiatan direncanakan pelaksanaannya di Kota Padang, sedangkan Proses pengadaan bantuan dilaksanakan secara tender. Sebelum pelaksanaan pemberian bantuan, dilaksanakan bimbingan yang akan direncanakan pelaksanaannya bulan Juli 2017, dimana seminar kit untuk masing-masing peserta telah disediakan tapi bimbingan tidak dapat dilaksanakan karena sampai Triwulan IV data tersebut yang disampaikan belum juga sesuai dengan ketentuan.

2. Kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90% dimana sisa anggaran merupakan dana yang tidak terpakai lagi. Dengan kegiatannya sebagai berikut:

NO	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	854.610.000,-	635.513.130,-	74,36
2	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	200.963.241,-	173.844.684,-	86,51
3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	18.200.000,-	15.059.950,-	82,75
4	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan	54.917.000,-	44.917.000,-	81,79
5	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	51.326.000,-	44.509.000	86,72
6	Rujukan penyandang masalah kesejahteraan sosial	95.110.460,-	78.165.760,-	82,18
7	Penyusunan peraturan Gubernur dan sosialisasi Perda Disabilitas	47.702.600,-	36.702.600,-	76,94
8	Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	40.018.900,-	26.158.900,-	65,37



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

9	Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat	378.500.000,-	300.941.800,-	79,51
10	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan lembaga kesejahteraan sosial	186.000.000,-	144.054.100,-	77,45
11	Rapat koordinasi penguatan lembaga RBM tentang korban penyalahgunaan NAPZA	36.099.700,-	32.179.700	89,14

Disamping kegiatan tersebut diatas yang realisasinya keuangan dibawah 100 % disebabkan sisa anggaran yang tidak terpakai/tidak digunakan lagi.

**BAB IV****KEBIJAKAN AKUNTASI**

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja serta penyajian laporan keuangan. Penyusunan neraca mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

**4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.**

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu SKPD Pengguna Anggaran yang memiliki peran sebagai entitas akuntansi. Selama tahun anggaran 2017 Dinas Sosial selaku entitas akuntansi, telah menyelenggarakan sistem akuntansi secara komprehensif, atas pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berdasarkan akrual berupa laporan Realisasi Anggaran, neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

**4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah basis akrual, di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan

pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Pendapatan adalah semua penerimaan yang masuk ke rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima di Kas umum Daerah.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Kas Umum Daerah.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antar aktiva dan hutang, yang terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

#### **4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.**

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

##### **4.3.1. Pengukuran / Penilaian Aset**

###### **a. Kas.**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

###### **b. Persediaan disajikan sebesar :**

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

###### **c. Tanah.**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

###### **d. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang



terjadi berkenaan dengan pembangunan gedung dan bangunan tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

e. Peralatan dan Mesin.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian, meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

f. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan melalui kontrak, meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

g. Aset tetap lainnya.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya melalui kontrak, meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya

perolehan aset tetap lainnya secara swakelola, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

h. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyusutan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset
- Nilai buku adalah nilai aset yang tertera pada catatan dan informasi akun dalam daftar aset , biasanya yang dicatat adalah harga ketika aset tersebut dibeli.
- Masa mamfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas Pemerintah dan atau pelayanan publik.
- Metode Penyusutan Aset tetap digunakan dengan metode garis lurus.

**4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.**

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos neraca daerah telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset tetap daerah. Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan pada tahun 2008, penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran, berdasarkan Pergub No. 5 tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014, mulai tahun 2014 telah dilakukan penyusutan aset tetap.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

##### 5.1.1. PENJELASAN POS-POS BELANJA

###### 1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
----	-----------	---------------	----------------	---	----------------

- a. **Belanja Pegawai 19.074.400.000,- 18.532.594.292,- 97,16 18.719.890.774,-**  
Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 dan 2016. Untuk realisasi Tahun 2017 mencapai 97,16% dari anggarannya. Sisa Belanja Pegawai sejumlah Rp. 541.805.708,- adalah sisa Gaji dan tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS dan tidak terealisasi karena adanya PNS yang pensiun dan meninggal dunia.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 terdapat penurunan sebesar Rp 187.296.482,-. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS. Tambahan penghasilan terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif. Rincian untuk belanja pegawai dapat diuraikan sebagai berikut :

-	Belanja Gaji dan Tunjangan	14.153.000.000,-	13.774.430.549,-	13.985.462.385,-
-	Belanja Tamb. Pengh PNS	4.921.400.000,-	4.758.163.743,-	4.734.428.389,-
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja.	4.921.400.000,-	4.758.163.743,-	4.734.428.389,-
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif	-	-	-
	<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>19.074.400.000,-</b>	<b>18.532.594.292,-</b>	<b>18.719.890.774,-</b>

Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2017 sejumlah Rp. 18.532.594.292,- yang terdiri dari :

- Belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 13.774.430.549,-.
- Belanja Tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 4.758.163.743,-.

Pengembalian belanja pegawai untuk tahun 2017 senilai Rp. 4.133.800,-. Ini dikarenakan adanya keterlanjuran pembayaran gaji pegawai pensiun a.n Basri M pada bulan Maret 2017, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 4.133.800,-.

No	Perkiraan	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
----	-----------	---------------	----------------	---	----------------

**b. Belanja Barang & Jasa 29.896.022.122,- 27.649.558.840,- 92,49 24.551.220.393,-**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 dan 2016. Untuk realisasi Tahun 2017 mencapai 92,49 % dari anggarannya. Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.2.506.006.570 adalah sisa anggaran belanja barang dan jasa yang tidak terealisasi karena adanya kegiatan yang tidak jadi terlaksana yakni kegiatan WRSE dan sisa anggaran yang tidak dipergunakan lagi atau karena efisiensi anggaran.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 terdapat kenaikan sebesar Rp.5.344.801.729,-. Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

-	Belanja Bahan Pakai Habis	10.829.176.149,-	10.755.886.171,-	99,32	9.530.664.318,-
-	Belanja bahan material	615.549.800,-	613.716.550,-	99,70	523.983.185,-
-	Belanja Jasa Kantor	3.612.674.461,-	3.254.455.211,-	90,08	3.350.182.520,-
-	Belanja Premi Asuransi	6.000.000,-	4.914.000,-	81,90	4.992.500,-
-	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	244.725.000,-	229.398.042,-	93,74	222.048.660,-
-	Belanja Cetak dan Penggandaan	197.207.190,-	195.942.270,-	99,36	199.285.035,-



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

-	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.000.000,-	33.600.000,-	90,81	6.600.000,-
-	Belanja Sewa Sarana Mobilitas darat	87.220.000,-	84.000.000,-	96,31	91.750.000,-
-	Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.500.000,-	30.500.000,-	100	30.500.000,-
-	Belanja Makanan dan Minuman	516.635.000,-	463.354.000,-	89,69	618.914.500,-
-	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	145.800.000,-	140.493.000,-	96,36	135.977.000,-
-	Belanja Pakaian Kerja	40.287.000,-	40.287.000,-	100	33.600.000,-
-	Belanja Pakaian Khusus dan Hari Tertentu	55.500.000,-	55.500.000,-	100	76.960.000,-
-	Belanja Perjalanan Dinas	2.585.001.800,-	2.364.830.704,-	91,48	1.786.732.980,-
-	Belanja Pemeliharaan	475.313.000,-	461.118.000,-	97,01	246.793.000,-
-	Belanja barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.216.750.000,-	2.892.459.700,-	68,59	2.805.525.245,-
-	Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	149.130.000,-	146.000.000,-	97,90	240.700.000,-
-	Belanja Jasa Lembaga	-	-	-	-
-	Uang Untuk Diberikan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat	42.200.000,-	42.200.000,-	-	-
-	Honorarium PNS	873.970.000,-	789.870.000,-	90,38	649.450.000,-
-	Honorarium Non PNS	3.714.758.284,-	3.660.446.980,-	98,54	2.741.222.300,-
-	Belanja Jasa Lainnya	62.087.688,-	61.231.712,-	98,62	40.300.000,-
-	Belanja kelayan/Atlit	1.347.136.750,-	1.317.955.500,-	97,83	1.168.339.150,-
-	Belanja Vaksinasi/Verifikasi	11.400.000,-	11.400.000,-	100	17.400.000,-
-	Belanja Honorarium Non Pegawai	-	-	-	-



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

	<b>Jumlah</b>	<b>29.896.022.122,-</b>	<b>27.649.558.840,-</b>	<b>92,49</b>	<b>24.551.220.393,-</b>
--	---------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------

Khusus mengenai belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

No	Uraian	Yang menerima	Jumlah (Rp)
1	Bahan keterampilan (mesin jahit dan kain)	200 orang	167.354.000,-
2	Alat dan bahan keterampilan (Toolkit) berupa tempat tidur Shihatsu dan massage	10 orang	56.463.000,-
3	Bahan Keterampilan (Toolkit) berupa Las Listrik/Karbit	160 orang	63.690.000,-
4	Bahan keterampilan (mesin jahit,perlengkapan menjahit, dan perlengkapan ibadah	41 orang	84.205.000,-

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah riil pengeluaran di tahun 2017.

Dari realisasi belanja barang ini, semuanya diserahkan kepada masyarakat dan klien di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan di PSBN Tuah Sakato Padang, PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dan PSBR Harapan Padang Panjang serta PSKW Andam Dewi Solok yang sudah diterminasi.

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja barang dan jasa selama tahun 2017 sejumlah Rp. 27.649.558.840,-. yang terdiri dari :

- Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp.10.755.886.171,-.
- Belanja bahan material sebesar Rp. 613.716.550,-.
- Belanja Jasa Kantor sebesar Rp. 3.254.455.211,-.
- Belanja Premi Asuransi Rp. 4.914.000,-.
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 229.398.042,-.
- Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 195.942.270,-.



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp. 33.600.000,-
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp. 84.000.000,-
- Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor sebesar Rp. 30.500.000,-
- Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp. 463.354.000,-
- Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar Rp. 140.493.000,-
- Belanja Pakaian Kerja sebesar Rp. 40.287.000,-
- Belanja Pakaian Khusus dan Hari Tertentu sebesar Rp. 55.500.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.364.830.704,-
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 461.118.000,-
- Belanja barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp. 2.892.459.700,-
- Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS sebesar Rp. 146.000.000,-
- Uang Untuk Diberikan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp. 42.200.000,-
- Honorarium PNS sebesar Rp. 789.870.000,-
- Honorarium Non PNS sebesar Rp. 3.660.446.980,-
- Belanja Jasa Lainnya sebesar Rp. 61.231.712,-
- Belanja kelayan/Atlit sebesar Rp. 1.317.955.500,-
- Belanja Vaksinasi/Verifikasi sebesar Rp. 11.400.000,-

Dari realisasi belanja barang ini, sejumlah Rp 237.741.000,- dikapitalisir menjadi Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :

<b>Ke Peralatan dan Mesin</b>	<b>106.661.500,00</b>
- Al-Quran Braille	22.374.000,00
- Mesin Tik Braile	31.900.000,00
- Tongkat Sensor (Smart Came)	52.387.500,00
<b>Ke Gedung dan Bangunan</b>	<b>39.741.000,00</b>



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

- Pembuatan WC 39.741.000,00

### Ke Aset Tetap Lainnya

**91.338.500,00**

- Drum Yamaha DTX 502	10.870.000,00
- Amply Guitar H.Kabinet	12.633.500,00
- Power Supply/Stabilizer	5.335.000,00
- Mike Wireles Ashley Pro 1	2.970.000,00
- Speaker Pasif 18"	15.400.000,00
- Speaker Pasif 15" Two Way	12.760.000,00
- Rak Sound Syistem	3.190.000,00
- Power Speaker 18"	6.930.000,00
- Power Speaker 15"	7.040.000,00
- Power Speaker 12"	3.850.000,00
- Power Tuter	3.850.000,00
- Equalizer	3.300.000,00
- Cresoper	3.300.000,00

Dikapitalisirnya belanja barang tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## 2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
	Belanja Modal	3.814.093.000,-	3.697.029.175,-	96,93	6.081.876.601 ,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2017 dan 2016 . Realisasi tahun 2017 mencapai 96,93 % dari anggarannya. Sisa anggaran Belanja modal sebesar **Rp.117.063.825,-** adalah sisa anggaran belanja Modal yang tidak terealisasi sisa anggaran yang tidak dipergunakan lagi atau karena efesiensi anggaran.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terdapat penurunan sebesar Rp 2.384.847.426,-. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja





## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Aset tetap Lainnya.

Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Perkiraan	Anggaran 2017	Realisasi 2017
1.	<b>Peralatan dan Mesin :</b>	<b>2.018.293.000,-</b>	<b>1.930.522.175,-</b>
	- Pengadaan Alat-alat bantu	30.800.000,-	25.800.000,-
	- Pengadaan Alat Angkutan darat bermotor	960.000.000,-	893.988.775,-
	- Pengadaan Alat Bengkel bermesin	200.000.000,-	198.715.000,-
	- Pengadaan Alat Ukur	2.000.000,-	-
	- Pengadaan Alat Kantor	4.000.000,-	4.000.000,-
	- Pengadaan Alat Rumah Tangga	619.570.000,-	608.176.000,-
	- Pengadaan Komputer	106.000.000,-	105.599.000,-
	- Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.500.000,-	7.500.000,-
	- Pengadaan Alat studio	48.673.000,-	48.493.400,-
	- Pengadaan Alat Peraga/Praktek sekolah	39.750.000,-	38.250.000,-
2.	<b>Gedung dan bangunan:</b>	<b>1.579.800.000,-</b>	<b>1.567.507.000,-</b>
	- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja	1.384.800.000,-	1.356.407.000,-
	- Pengadaan Bangunan Gedung tempat tinggal	195.000.000,-	194.100.000,-
	- Pengadaan Sumur Bor	17.000.000,-	17.000.000,-
3.	<b>Aset Tetap Lainnya:</b>	<b>199.000.000,-</b>	<b>199.000.000,-</b>
	- Pengadaan Buku Pustaka	199.000.000,-	199.000.000,-



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

No	Perkiraan	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.018.293.000,-	1.930.522.175,-	95,65	3.301.783.401,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2017 dan 2016. Realisasi tahun 2017 mencapai 95,65 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terdapat peningkatan sebesar Rp.1.371.261.226,-. Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

NO	URAIAN	Jumlah	Realisasi 2017
1	AC	1 Unit	6.500.000,-
2	Kendaraan Roda 2	1 Unit	18.325.775,-
3	Tabung Pemadam Kebakaran	4 Buah	8.000.000,-
4	TV 32 Inchi	1 Unit	3.600.000,-
5	CCTV Lengkap	1 Set	21.993.400,-
6	AC	5 Unit	32.500.000,-
7	Mobil Dinas Isuzu	1 Unit	435.993.000,-
8	Mobil Ambulan Daihatzu	1 Unit	225.450.000,-
9	Laptop	4 Unit	31.880.000,-
10	Komputer	4 Unit	31.860.000,-
11	Printer Biasa	2 Unit	2.950.000,-
12	Printer Multi Fungsi	2 Unit	5.910.000,-
13	Mesin Potong Rumput	1 Unit	2.000.000,-
14	Kipas Angin Besar	2 Unit	3.000.000,-
15	AC	1 Unit	6.000.000,-
16	Tape Mobil	1 Unit	1.500.000,-
17	CCTV Lengkap	1 Unit	10.150.000,-
18	Plang Kantor	1 Unit	4.000.000,-
19	Mesin Potong Rumput	1 Unit	2.000.000,-
20	Kipas Angin Besar	1 Unit	6.000.000,-
21	Tangga Lipat Aluminium	1 Unit	1.800.000,-
22	Mesin Jahit Hitam Dinamo	7 Unit	16.450.000,-
23	Mesin Jahit	8 Unit	16.800.000,-
24	Genset	1 Unit	21.800.000,-
25	Pemanas Air Tenaga Surya	1 Unit	9.988.000,-
26	Reciver Digital + Antena Parabola	3 Unit	3.000.000,-
27	Tempat Tidur Bertingkat & Kasur	32 Set	198.968.000,-
28	AC	2 Unit	12.000.000,-
29	AC	6 Unit	36.000.000,-
30	Televisi 32 Inchi	1 Unit	3.750.000,-



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

31	Pengadaan Otomotif	1 Keg	198.715.000,-
32	Tempat Penyaji Makanan Prasmanan	3 Buah	9.000.000,-
33	Mesin Cuci	4 Unit	9.000.000,-
34	Lemari Piring	1 Buah	1.500.000,-
35	Tangga Lipat Stainles	1 Buah	1.800.000,-
36	Tangki Penyuling Air Stainless	1 Buah	2.500.000,-
37	Lemari Pakaian 2 Pintu	1 Buah	3.000.000,-
38	Komputer	1 Unit	8.000.000,-
39	Komputer Lengkap	1 Unit	15.000.000,-
40	Meja Resepsionis	1 Unit	7.500.000,-
41	Televisi 42 Inchi	1 Unit	7.500.000,-
42	Gas Cooker/Rice Cooker	1 Unit	3.500.000,-
43	Mobil Toyota Grand New Avanza	1 Unit	214.220.000,-
44	Lemari Arsip Ruang Belajar	1 Buah	4.500.000,-
45	Gas Cooker/Rice Cooker	1 Unit	5.000.000,-
46	Kulkas	1 Unit	3.500.000,-
47	Mesin Obras	2 Unit	5.000.000,-
48	Lemari Pakaian 2 Pintu	10 Buah	29.700.000,-
49	Tempat Tidur Susun/Bertingkat	25 Buah	140.250.000,-
50	Lemari Arsip	3 Buah	13.200.000,-
51	Meja Makan	4 Buah	11.880.000,-
52	Jaringan CCTV	1 Paket	9.999.000,-
53	Mesin Jahit Sarikayo	1 Unit	5.280.000,-
54	Rak Piring Asrama	3 Unit	8.970.000,-
55	Tempat Sampah	2 Unit	2.340.000,-
56	Jemuran Kain	3 Buah	6.000.000,-
57	Tangga Lipat	1 Buah	8.500.000,-
58	Tempat Tidur	6 Buah	15.000.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>1.930.522.175,-</b>

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah **Rp.87.770.825,-** Adalah sisa anggaran yang tidak dipergunakan lagi.

No	Perkiraan	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
----	-----------	---------------	----------------	---	----------------

- a. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**    1.579.800.000,-    1.567.507.000,-    99,22    2.432.478.200,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2017 dan 2016. Realisasi tahun 2017 mencapai 99,22% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terdapat



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

penurunan sebesar Rp. 864.971.200,- . Adapun rincian objek belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah	Realisasi
1	Pembuatan Toilet	1 Keg	227.500.000,-
2	Rehab Gedung	1 Keg	199.540.000,-
3	Rehab Gedung	1 Keg	161.064.000,-
4	Rehab Gedung	1 Keg	187.900.000,-
5	Rehab Gedung	1 Keg	197.500.000,-
6	Rehab Mushalla	1 Paket	149.383.000,-
7	Rehab Asrama	1 Paket	194.100.000,-
8	Rehab Ruang Keterampilan	1 Paket	189.520.000,-
	<b>Jumlah</b>		<b>1.567.507.000,-</b>

Dari jumlah diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengadaan gedung kantor terdiri dari 8 unit kegiatan dengan uraian:
  - a. Pembuatan Toilet UPTD PSTW Sabai Nan Aluih.
  - b. Rehab Gedung Kantor UPTD PSBR Harapan Padang Panjang.
  - c. Rehab Gedung Kantor UPTD PSBN Padang.
  - d. Rehab Gedung Kantor UPTD PSAABR Budi Utama Lb.Alung.
  - e. Rehab Gedung Kantor Dinas.
  - f. Rehab Mushalla UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak.
  - g. Rehab Asrama UPTD PSAABR Budi Utama Lb.Alung.
  - h. Rehab Ruang Keterampilan UPTD PSBGHI Padang.

Sisa Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah **Rp.12.293.000,-** adalah sisa anggaran yang tidak dipergunakan lagi.

No	Perkiraan	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
b.	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>199.000.000,-</b>	<b>199.000.000,-</b>	<b>100</b>	<b>138.280.000,-</b>



Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya tahun 2017 dan 2016. Realisasi tahun 2017 mencapai 100 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 201 terdapat peningkatan sebesar Rp.60.720.000,- Hal ini disebabkan adanya kebutuhan pengadaan buku pustaka untuk UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Adapun rincian objek belanja modal Aset Tetap Lainnya terdiri dari :

no	Uraian	jumlah	Realisasi
1	Pengadaan buku	1 Keg	199.000.000,-

Daftar Belanja Modal Tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 21

## 5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

### 5.2.1. Aset

#### Aset Lancar

Perkiraan	2017	2016 (Audited)
-----------	------	----------------

1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,-	0,-
---------------------------------	-----	-----

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016. Sampai dengan 31 Desember 2017 , sisa UYHD sebesar Rp. 1.296.008.613,- telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 28 Desember 2017. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2016.

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 5.

Perkiraan	2017	2016 (Audited)
-----------	------	----------------

1. Setara Kas	0,00,-	0,00,-
---------------	--------	--------

Jumlah tersebut merupakan saldo kas lainnya pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016. Sampai dengan 31 Desember 2016 . Pada tahun 2017 dan 2016 tidak terdapatnya Aset Lancar yang setara kas.



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

Perkiraan	2017	2016 (Audited)
-----------	------	----------------

### 2. Beban Dibayar Dimuka 2.047.500,-      2.080.208,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016, yaitu beban jasa dibayar dimuka /beban sewa dibayar dimuka berupa : Asuransi Kendaraan Bermotor BA. 58 Toyota Innova G/MB tahun pembuatan 2011, dengan periode Asuransi tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan 09 Mei 2018 sebesar 4.914.000,-. Dengan perhitungan yang menjadi beban dibayar dimuka per Desember tahun 2017 sebesar: Rp. 4.914.000,- : 12 bulan = Rp. 409.500,- x 7 bulan = Rp. **2.866.500,-**. Sedangkan jumlah beban dibayar dimuka yang akan dibayarkan untuk tahun selanjutnya yakni sampai tanggal 09 Mei 2018 sebesar: Rp.4.992.500,- : 12 bulan = Rp.409.500 x 5 bulan = Rp.**2.047.500,-** .

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Premi Asuransi	2.080.208,-	2.047.500,-	2.080.208,-	2.047.500,-

Penambahan adalah jumlah beban dibayar dimuka yang akan dibayarkan ditahun selanjutnya yakni sebesar Rp.2.047.500,-.

Pengurangan adalah jumlah beban dibayar dimuka yang menjadi beban per Desember 2017 yakni sebesar Rp. 2.080.208,-.

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

Perkiraan	2017	2016 (Audited)
-----------	------	----------------

### 3. Persediaan 8.512.415,-      21.100.298,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	JUMLAH	
		TAHUN 2017	TAHUN 2016
A.	<b>PERSEDIAAN BAHAN PAKAI HABIS</b>	<b>6.316.515</b>	<b>13.844.896</b>
1.	ATK	1.585.090	3.441.975
2.	ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK	707.625	2.257.416



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

3.	PERALATAN PEMBERSIH DAN BAHAN PEMBERSIH	921.800	1.900.505
4	BAHAN PAKAI HABIS LAINNYA	3.102.000	6.245.000
<b>B</b>	<b>PERSEDIAAN BAHAN/MATERIAL</b>	<b>2.195.900</b>	<b>7.128.302</b>
1	OBAT-OBATAN	1.187.300	6.497.300
2	ALAT PRAKTEK	894.250	631.002
<b>C.</b>	<b>PERSEDIAAN BAHAN DOKUMENTASI/CETAK</b>	<b>114.350</b>	<b>127.100</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.512.415</b>	<b>21.100.298</b>

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<b>PERSEDIAAN BAHAN PAKAI HABIS</b>	<b>15.337.119,-</b>	-	<b>9.020.604,-</b>	<b>6.316.515,-</b>
ATK	4.141.774,-	-	2.556.684,-	1.585.090,-
Alat Listrik dan Elektronik	1.096.325,-	-	388.700,-	707.625,-
Bahan Pembersih	2.836.120,-	-	1.914.320,-	921.800,-
Bahan Pakai Habis lainnya	7.262.900,-	-	4.160.900,-	3.102.000,-
<b>PERSEDIAAN BAHAN MATERIAL</b>	<b>1.538.950,-</b>	<b>565.250,-</b>	<b>22.650,-</b>	<b>2.081.550,-</b>
Obat-Obatan	1.209.950,-	-	22.650,-	1.187.300,-
Alat praktek	329.000,-	565.250,-	-	894.250,-
<b>PERSEDIAAN BAHAN CETAK</b>	<b>77.950,-</b>	<b>36.400,-</b>	-	<b>114.350,-</b>
Cetak	77.950,-	36.400,-	-	114.350,-

Penambahan adalah penambahan alat praktek keterampilan klien di UPTD dan bahan cetak sehingga merupakan penambahan jumlah persediaan bahan material dan persediaan bahan cetak di akhir tahun 2017 sebesar Rp.601.650,-.

Pengurangan adalah adanya pengurangan kebutuhan ATK dan alat rumah kantor di UPTD yang terdiri dari ATK, Alat listrik dan Elektronik, Bahan Pembersih, Bahan Pakai habis Lainnya dan Bahan Obat-Obatan sebesar Rp.9.043.254,-

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

### Aset Tetap

Perkiraan	2017	2016(Audited)
-----------	------	---------------

1. Tanah	21.690.396.000,-	21.690.396.000,-
----------	------------------	------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan 2016 .

#### 1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp. 21.630.484.000,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2016	Rp. 59.912.000,00

Daftar Tanah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

#### 2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	21.690.396.000,-	-		21.690.396.000,-

**Saldo Audited 2017** 21.690.396.000,-

**Mutasi Tambah** -

**Total Mutasi Tambah** -

**Saldo per 31 Des 2017** 21.690.396.000,-

Perkiraan	2017	2016 (Audited)
-----------	------	----------------

2. Peralatan dan Mesin	15.612.008.065,00-	12.262.872.368,00-
------------------------	--------------------	--------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan 2016 .





## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

### 1) Dasar Penilaian

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| a. Neraca Awal 2005             | Rp. 1.670.445.563,00 |
| b. Harga Perolehan 2006 sd 2017 | Rp 13.941.562.502,00 |

Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

### 2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	12.262.872.368,00	3.548.135.697,00	199.000.000,00	15.612.008.065,00
Akm Peny Peralatan & Mesin	8.102.198.108,57	2.789.024.184,56	-	10.891.222.293,13,00
Nilai Buku	4.160.674.259,43	759.111.512,44	199.000.000,00	4.720.785.771,87

<b>Saldo Audited 2016</b>	<b>12.262.872.368,-</b>
<b><u>Mutasi Tambah</u></b>	<b>3.548.135.697,-</b>
Belanja Modal tahun 2017	2.129.522.175,-
Belanja Barang dan Jasa dikapitalisir 2017	106.661.500,-
Hibah dari Pihak Ketiga	586.796.466,-
Mutasi antar SKPD	725.155.556,-
<b><u>Mutasi Kurang</u></b>	<b>( 199.000.000,-)</b>
Reklas	199.000.000,-
<b>Total Mutasi</b>	<b>3.349.135.697,-</b>
<b>Saldo per 31 Des 2017</b>	<b>15.612.008.065,-</b>

#### Penjelasan Mutasi Tambah

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.129.522.175,- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- Belanja barang dan jasa dikapitalisir per 31 desember tahun 2017 sebesar Rp.106.661.500,- yang terdiri dari : 1. Al.-quran Braille UPTD PSBN Padang senilai Rp.22.374.000,-. 2. Mesin Tik Braille UPTD PSBN Padang senilai



Rp.31.900.000,- 3. Tingkat sensor (smart came) UPTD PSBN Padang senilai Rp.3.492.500,- dengan total jumlah nilai sebesar Rp.106.661.500,-

- Hibah dari Pihak Ke Tiga senilai Rp.586.796.466,- yaitu dari Kementrian Republik Indonesia berdasarkan Surat Berita Acara Serah Terima tanggal tiga belas bulan Maret tahun 2017 yang terdiri dari: 1. Kendaraan Bus URSK Roda 6 dengan No.Plat B 7153 IQ senilai Rp. 392.019.570,- 2. Kendaraan Mini Bus URSK Roda 4 dengan No.Plat B 7093 IQ senilai Rp.194.776.896,-.
- Mutasi antar SKPD senilai Rp. 725.155.556,- yaitu dari Setwan Sekretariat Daerah senilai 525.655.556,- berdasarkan Surat Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal lima belas bulan November tahun 2017 yang terdiri dari: 1. Minibus Toyota Innova V Plat BA.1554 B senilai Rp.245.500.000,- dan 2. Minibus Toyota Innova V Plat BA 1737 B senilai Rp. 280.155.556,- dengan total jumlah nilai Rp. 525.655.556,- . Mutasi dari Biro Umum Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal enam bulan April tahun 2017 yang terdiri dari: 1. Minibus Toyota Innova Plat BA 1757 B senilai Rp.199.500.000,-

- **Penjelasan Mutasi Kurang**

- a) Reklas Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.199.000.000,-

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 17

Perkiraan	2017	2017 (Audited)
-----------	------	----------------

**2. Gedung dan Bangunan 41.702.223.195,- 40.136.225.195,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan 2016 .

**1) Dasar Penilaian**

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 30.608.338.000,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2017 Rp. 11.093.885.195,00

Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

**2) Mutasi Tambah Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung & Bangunan	<b>40.136.225.195,00,-</b>	<b>1.607.248.000,00,-</b>	41.250.000,00,-	<b>41.702.223.195,00-</b>
Akm Peny Gedung & Bangunan	17.167.739.104,23	874.342.661,56,-	16.675.000,00,-	18.025.406.765,79
Nilai buku	22.968.486.090,77	732.905.338,44,-	24.575.000,00,-	

<b>Saldo Audited 2016</b>	<b>40.136.225.195,-</b>
<b><u>Mutasi Tambah</u></b>	<b>1.607.248.000,-</b>
Belanja Modal tahun 2017	1.550.507.000,-
Belanja Barang dan Jasa dikapitalisir 2017	39.741.000,-
Reklas	17.000.000,-
<b><u>Mutasi Kurang</u></b>	
Reklas ke aset lainnya	41.250.000,-
<b>Saldo per 31 Des 2017</b>	<b>41.702.223.195,-</b>

**Penjelasan Mutasi Tambah**

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.607.248.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
- Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir per 31 Desember 2017 yang terdiri dari belanja pemeliharaan yakni pembuatan wc Dinas Sosial senilai Rp.39.741.000,-.

**Penjelasan Mutasi Kurang**

- Reklas penghapusan ke aset lainnya yaitu bangunan asrama talang UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin senilai Rp.41.250.000,-, dengan Surat Keputusan Penghapusan dari Gubernur Sumatera Barat : No.030.1034/2017 tanggal 18 Desember 2017.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 17



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

Perkiraan	2017	2016 (Audited)
-----------	------	----------------

### 3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

0

0

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Jalan Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan 2016 .

#### 1) Dasar Penilaian,

a. Neraca Awal 2005	Rp	0,00,-
b. Harga Perolehan 2006 sd 2017	Rp.	0,00,-

Daftar Jaringan,Irigasi dan Jaringan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

#### 2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Jln Irigasi & Jaringan	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00-
Akm Jln Irigasi & Jaringan				
Nilai Buku				

**Saldo Audited 2016** 0,00,-

**Mutasi Tambah** 0,00,-

Belanja Modal Tahun 2017 0,00,-

**Mutasi Kurang**

Reklasifikasi 0,00,-

Saldo per 31 Des 2017 0,00,-

#### Penjelasan Mutasi Tambah

Tidak ada mutasi tambah untuk Jalan,Irigasi dan Jaringan pada tahun 2017

#### Penjelasan Mutasi Kurang

Tidak ada mutasi kurang untuk Jalan,Irigasi dan Jaringan pada tahun 2017



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2017	2016 (Audited)
-----------	------	----------------

4. Aset Tetap Lainnya	611.629.400,00	321.290.900,00
-----------------------	----------------	----------------

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015 .

### 1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp.	0,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2016	Rp.	611.629.400,00

Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

### 2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	321.290.900,00	290.338.500,00	-	611.629.400,00
Akm Peny Aset Tetap Lainnya	97.547.050,00	44.027.850,00	-	141.574.900,00
Nilai Buku	223.743.850,00	246.310.650,-		470.054.500,00

<b>Saldo Audited 2016</b>	<b>321.290.900,-</b>
<b><u>Mutasi Tambah</u></b>	<b>290.338.500,-</b>
Belanja Modal tahun 2017	0,00,-
Belanja Barang dan Jasa dikapitalisir tahun 2017	91.338.500,-
Reklas	199.000.000,-
<b>Saldo per 31 Des 2017</b>	<b>611.629.400,-</b>

**Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 0,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- b) Belanja barang dan jasa dikapitalisir per 31 Desember 2017 berupa peralatan musik untuk jurusan musik tuna netra UPTD PSBN Padang yang terdiri dari : 1. Drum Yamaha DTX 502 senilai Rp.10.780.000,-.2. Amply Guitar H.Kabinet senilai Rp.12.633.500,-.3. Power Supply/Stabilizer senilai Rp.5.335.000,-.4. Mike Wireles Ashley Pro 1 senilai Rp.2.970.000,-.5. Speaker Pasif 18" senilai Rp.15.400.000,-.6. Speaker Pasif 15" Two Way senilai Rp.12.760.000,-. 7. Rak Sound System senilai Rp.3.190.000,-.8. Power Speaker 18" senilai Rp.6.930.000,-.9. Power Speaker 15" senilai Rp.7.040.000,-. 10. Power Speaker 12" senilai Rp. 3.850.000,-.11. Power Tuter senilai Rp.3.850.000,-.12. Equlizer senilai Rp. 3.300.000,-.13. Cresoper senilai Rp.3.300.000 dengan total jumlah senilai Rp.91.338.500,-.

**Penjelasan Mutasi Tambah**

Tidak ada mutasi kurang untuk Aset Tetap Lainnya pada tahun 2017.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17 .

Perkiraan	2017	2016(Audited)
-----------	------	---------------

**5. Akumulasi Penyusutan (25.367.484.262,80,-) (25.367.484.262,80,-)**

Terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin : (10.891.222.293,13) ( 8.102.198.108,57)
- Akumulasi Penyusutan Gdg & Bangunan: (18.025.406.765,79) (17.167.739.104,23)
- Akumulasi Penyusutan Jln,Irigasi & Jaringan : 0,00 0,00
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya : ( 141.574.900,-) ( 97.547.050,00)



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm.Peralatan dan Mesin	8.102.198.105,57	2.789.024.184,58	-	10.891.222.293,13
Akm.Gedung dan Bangunan	17.167.739.104,23	874.342.661,56	16.675.000,-	18.025.406.765,79
Akm.Jln Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
Akm Aset Tetap Lainnya	97.547.050,00	44.027.850,00	-	141.574.900,00
Jumlah Akm Penyusutan	25.367.484.262,80			29.058.203.958,92

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2017 dan 2016. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jln Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2016 (NERACA RESTATEMENT)	8.102.198.108,57,-	17.167.739.104,23,-	-	97.547.050,-,-
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	1.145.518.688,50,-	50.475.999,99,-	-	-
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	0,00,-	16.675.000,-	-	-
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2017	1.643.505.496,06,-	823.866.661,57,-	-	44.027.850,-
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 17	8.102.198.108,57,-	18.025.406.765,79,-	-	141.574.900,-

### Penjelasan Mutasi Tambah:

- Hibah dari Pihak Ke Tiga senilai Rp.586.796.466,- yaitu dari Kementerian Republik Indonesia berdasarkan Surat Berita Acara Serah Terima tanggal tiga belas bulan Maret tahun 2017 yang terdiri dari: 1. Kendaraan Bus URSK Roda 6 dengan No.Plat B 7153 IQ senilai Rp. 392.019.570,-. 2. Kendaraan Mini Bus URSK Roda 4 dengan No.Plat B 7093 IQ senilai Rp.194.776.896,-.



- b) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 558.722.222,- yaitu dari Setwan Sekretariat Daerah senilai 359.222.222,- berdasarkan Surat Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal lima belas bulan November tahun 2017 yang terdiri dari: 1. Minibus Toyota Innova V Plat BA.1554 B senilai Rp.184.125.000,- dan 2. Minibus Toyota Innova V Plat BA 1737 B senilai Rp. 175.097.222,- dengan total jumlah nilai Rp. 359.222.222,- . Mutasi dari Biro Umum Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal enam bulan April tahun 2017 yang terdiri dari: 1. Minibus Toyota Innova Plat BA 1757 B senilai Rp.199.500.000,-
- c) Koreksi tambah nilai sesuai Appaisal sebesar Rp. 0,50
- d) Beban Penyusutan Peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.643.505.496,06,-.
- e) Koreksi tambah nilai sesuai Appaisal sebesar Rp. 50.475.999,99,-.
- f) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2017 sebesar Rp. 823.666.661,57
- g) Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya Tahun 2017 sebesar Rp. 44.027.850,-.

**Penjelasan Mutasi Kurang:**

- a) Reklas penghapusan ke aset lainnya yaitu bangunan asrama talang UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin senilai Rp.16.675.000,-, dengan Surat Keputusan Penghapusan dari Gubernur Sumatera Barat : No.030.1034/2017 tanggal 18 Desember 2017.

Penjelasan mutasi tambah kurang diatas adalah per akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jln Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya.

**KEWAJIBAN****KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Perkiraan	2017	2016 (Audited)
-----------	------	----------------

1. Utang Belanja **Rp. 770.386.521,-** **800.196.237,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2017 dan 2016 . Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah





## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

dilaporkan untuk bulan November sebesar Rp.385.059.950,-dan bulan Desember sebesar Rp. 385.326.571,-. Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 12 tahun 2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada pasal 9 yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Pegawai	800.196.237,-	770.386.521,-	800.196.237,-	770.386.521,-

- Penambahan sebesar Rp. 770.386.521,- adalah adanya utang belanja Pegawai berupa Tambahan penghasilan PNS tahun 2017.
- Pengurangan sebesar Rp. 800.196.237,- adalah Utang belanja Pegawai tahun lalu berupa Tambahan Penghasilan PNS yang telah dibayarkan pada tahun 2017.

- Utang belanja barang dan Jasa Rp 29.465.878,-

Yaitu utang belanja telp, listrik, air, internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2017 yang dibayarkan bulan Januari 2018.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan jasa	48.673.621,-	29.465.878,-	48.673.621,-	29.465.878,-

Penambahan sebesar Rp. 29.465.878,- adalah pengakuan utang listrik,telepon,air dan internet tahun 2017.

Pengurangan sebesar Rp.48.673.621,- adalah utang listrik,telepon,air dan internet tahun lalu yang telah dibayarkan pada tahun 2017.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13

### EKUITAS

Perkiraan	2017	2016 (Audited)
-----------	------	----------------

2. **Ekuitas** **Rp. 50.568.612.616,08,-** **Rp. 48.217.610.848,20,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan 2016 . Ekuitas ini terdiri dari:



• Ekuitas	:	49.768.760.217,08
• Surplus/Defisit LO	:	(48.419.415.271.63)
• Perubahan SAL	:	49.879.182.307,00
• Surplus/Defisit LRA	:	(49.879.182.307,00)
• RK/PPKD	:	49.879.182.307,00
• Jumlah Ekuitas	:	50.568.612.616,08

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

## PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

### 5.3.1 BEBAN

#### Beban Operasi

Perkiraan	2017	2016 (Audited)
-----------	------	----------------

a. Beban Pegawai	18.502.784.576,-	18.729.647.222,-
------------------	------------------	------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai per 31 Desember 2017 dan 2016. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO, yaitu :

Uraian	2017	2016 (Audited)
• Beban Pegawai	13.774.430.549,-	13.985.462.385,-
• Gaji dan tunjangan		
• Tambahan Penghasilan PNS	4.728.354.027,-	4.744.184.837,-
Jumlah	18.502.784.576,-	18.729.647.222,-



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
• Gaji dan tunjangan	13.774.430.549,-	13.774.430.549,-	-
• Tambahan Penghasilan PNS	4.758.163.743,-	4.728.354.027,-	29.809.716,-
Jumlah	18.532.594.292,-	18.502.784.576,-	29.809.716,-

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO bulan November 2017 sebesar Rp 385.059.950,- dan bulan Desember 2016 sebesar Rp.385.326.571,- berdasarkan hasil verifikasi Laporan Harian PNS yang telah bekerja bulan November dan Desember 2017 dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi pada bulan Januari dan Februari 2018 sehingga dicatat sebagai utang belanja pegawai per 31 Des 2017.
- Pembayaran utang belanja pegawai Tahun 2016 sebesar Rp.800.196.237,- yang telah dibayarkan pada Tahun 2017.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Tambahan Penghasilan		800.196.237,-	770.386.521,-		770.386.521,-	800.196.237,-
Jumlah		800.196.237,-	770.386.521,-		770.386.521,-	800.196.237,-

Perkiraan	2017	2016 (Audited)
-----------	------	----------------

**b. Beban Barang & Jasa                      27.405.230.688,-      24.553.166.847,68,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Beban LO	Beban Brg&Jasa LO
• Beban Bahan Pakai Habis	10.565.414.552
• Beban Bahan/Material	618.763.302
• Beban Jasa Kantor	3.235.247.468
• Beban Premi asuransi	4.946.708
• Beban perawatan kendaraan	229.398.042
• Beban cetak/ pengandaan	195.955.020
• Beban sewa rumah,gedung, ruangan	33.600.000
• Beban sewa mobilitas	84.000.000
• Beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor	30.500.000
• Beban makan dan minum	463.354.000
• Beban pakaian dinas & Atributnya	140.493.000
• Beban pakaian kerja	40.287.000
• Beban pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.500.000
• Beban Perjalanan dinas	2.364.830.704
• Beban pemeliharaan	421.377.000
• Beban barang diserahkan kepada pihak ketiga	2.892.459.700
• Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	146.000.000
• Beban honorarium non pegawai	3.660.446.980
• Beban Honorarium PNS	789.870.000
• Beban Uang untuk pihak ke tiga/ masyarakat	42.200.000
• Beban Belanja jasa lainnya	61.231.712
• Beban Kelayan/Atlit	1.317.955.500
• Beban Vakasi/Verifikasi	11.400.000
<b>Jumlah</b>	<b>27.405.230.688</b>

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg & Jasa LRA	Beban Brg & Jasa LO	Selisih +/-
• Belanja Bahan Pakai Habis	10.755.886.171	10.565.414.552	190.471.619
• Belanja Bahan/Material	613.716.550	618.763.302	(5.046.752,-)
• Belanja Jasa Kantor	3.254.455.211	3.235.247.468	19.207.743



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

• Belanja Premi asuransi	4.914.000	4.946.708	(32.708,-)
• Belanja perawatan kendaraan	229.398.042	229.398.042	-
• Belanja cetak/ pengandaan	195.942.270	195.955.020	(12.750,-)
• Belanja sewa rumah,gedung, ruangan	33.600.000	33.600.000	-
• Belanja sewa mobilitas	84.000.000	84.000.000	-
• Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	30.500.000	30.500.000	-
• Belanja makan dan minum	463.354.000	463.354.000	-
• Belanja pakaian dinas	140.493.000	140.493.000	-
• Belanja pakaian kerja	40.287.000	40.287.000	-
• Belanja pakaian kusus	55.500.000	55.500.000	-
• Belanja Perjalanan dinas	2.364.830.704	2.364.830.704	-
• Belanja pemeliharaan	461.118.000	421.377.000	39.741.000
• Belanja barang diserahkan kepada pihak ketiga	2.892.459.700	2.892.459.700	-
• Belanja kusus pelatihan , sosialisasi dan bimbingan teknis	146.000.000	146.000.000	-
• Uang untuk pihak ketiga/ masyarakat	42.200.000	3.660.446.980	-
• Honorarium PNS	789.870.000	789.870.000	-
• Honorarium non PNS	3.660.446.980	42.200.000	-
• Belanja jasa lainnya	61.231.712	61.231.712	-
• Belanja Kelayan/Atlit	1.317.955.500	1.317.955.500	
• Belanja Vakasi/Verifikasi	11.400.000	11.400.000	
<b>Jumlah</b>	<b>27.649.558.840,00,-</b>	<b>27.405.230.688</b>	<b>(244.328.152,-)</b>



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

Penjelasan selisih:

- a) Penyesuaian Persediaan pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smstr 1		Penyesuaian Smstr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Bahan Pakai Habis	<b>1.161.091,-</b>	<b>2.653.314,-</b>	<b>9.020.604,-</b>	-	<b>10.181.695,-</b>	<b>200.653.314,-</b>
- ATK		699.799,-	2.556.684,-		2.556.684,-	699.799,-
- Bahan pembersih		935.615,-	1.914.320,-		1.914.320,-	935.615,-
- Pakai habis lainnya		1.017.900,-	4.160.900,-	198.000.000,-	4.160.900,-	199.017.900,-
• Alat listrik & elektronik	1.161.091,-		388.700,-		1.549.791,-	
• Bahan Material	<b>5.589.352,-</b>		<b>22.650,-</b>	<b>565.250,-</b>	<b>5.612.002,-</b>	<b>565.250,-</b>
- Obat-obatan	5.287.350,-		22.650,-		5.310.000,-	
- Praktek	302.002,-			565.250,-	302.002,-	565.250,-
• Blj bhn cetak	<b>49.150,-</b>			<b>36.400,-</b>	<b>49.150,-</b>	<b>36.400,-</b>
Jumlah					<b>15.842.847,-</b>	<b>201.254.964,-</b>

- a Penyesuaian mengurangi beban barang dan jasa.

- Penyesuaian Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smstr 1		Penyesuaian Smstr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Premi	2.080.208	0,00	0,00	2.047.500	2.080.208	2.047.500

- Penyesuaian pembayaran utang belanja barang dan jasa tahun 2017 berupa Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet dengan rincian sebagai berikut



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smstr 1		Penyesuaian Smstr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Telepon		3.931.246,-	1.049.290,-		1.049.290,-	3.931.246,-
• ,Air		14.460.650,-	13.141.350,-		13.141.350,-	14.460.650,-
• Listrik		28.614.909,-	14.351.396,-		14.351.396,-	28.614.909,-
• Internet		1.666.816,-	923.842,-		923.842,-	1.666.816,-
Jumlah					29.465.878,-	48.673.621,-

- Penyesuaian Beban Pemeliharaan untuk mengakui beban pemeliharaan dikapitalisir tahun 2017.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smstr 1		Penyesuaian Smstr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Beban Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	39.741.000	0,00	39.741.000

Perkiraan	2017	2016 (Audited)
-----------	------	----------------

### c. Beban Penyusutan 2.511.400.007,63,- 2.300.516.519,33,- Dan Amortisasi

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2017. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 1.643.505.496,06,-
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 823.866.661,57,-
- Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 44.027.850,-

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014

tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17

#### 5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan		2017
1. Ekuitas awal	:	48.217.610.848,20
2. Surplus/Defisit LO	:	(49.419.415.271,63)
3. RK PPKD	:	49.879.182.307,00
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan	:	(115.957.334,51)
• Mutasi tambah Aset Tetap	:	(166.433.334,50)
• Mutasi kurang Aset Tetap	:	50.475.999,99
5. Ekuitas Akhir	:	50.568.612.616,08

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 48.217.610.848,20,- adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca Restatement per 31 Des 2016.
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp.49.419.415.271,63,- adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2017.



3. RK PPKD sebesar Rp.49.879.182.307,- adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD Tahun 2017 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yaitu :
  - a. Koreksi Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 166.433.334,-.
  - b. Koreksi Mutasi Tambah nilai sesuai Appaisal Rp. 0,50,-
  - c. Koreksi Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 50.475.999,99,-.
5. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 50.568.612.616,08 adalah saldo Ekuitas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017.

**5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.**

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Beban Dibayar Dimuka
2. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	18.532.594.292,00	18.502.784.576,00	29.809.716,-
• Belanja Brg & Jasa	27.649.558.840,00	27.405.230.688,00	244.328.152,-
• Belanja Modal	3.697.029.175,00	-	3.697.029.175,00



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL

• Beban Penyusutan & Amortisasi	-	2.511.400.007,63	(2.511.400.007,63)
Jumlah Beban Operasi	<b>49.879.182.307,00,-</b>	<b>48.419.415.271,63</b>	<b>1.459.767.035,37</b>

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

**BAB VI****PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN****6.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat dinyatakan pada pasal 11 (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang sosial. Pada pasal 12 Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan. Dalam kewenangan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial diwujudkan dalam tugas pokok dan fungsi..

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sbb :

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut diatas. Pada pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang sosial;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- a. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**6.2 Struktur Organisasi****a. Susunan Organisasi.**

Mengacu pada pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2008, Dinas Sosial memiliki susunan organisasi yang terdiri dari :

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, ketatausahaan, ketatalaksanaan, humas, protokol, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat. Sekretariat terdiri dari ;

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub. Bagian Keuangan.
- c. Sub. Bagian Program dan Data.

C. Bidang Pemberdayaan Sosial.

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai Tugas menyiapkan bahan-bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pemberdayaan Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari ;

- a. Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil;
- b. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial;
- c. Seksi Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;

D. Bidang Penanganan Fakir Miskin;

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Penanganan Fakir Miskin. Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri dari ;

1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan;
2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
3. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan;

E. Bidang Rehabilitasi Sosial.

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Rehabilitasi Sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari:

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
3. Seksi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

F. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Perlindungan dan Jaminan Sosial. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari:

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga;

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui sistem panti;

H. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi, tujuan dan sasaran, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan komprehensif. Penerapan pendekatan ini dengan perspektif masalah kesejahteraan sosial dan cara penanganannya. Pada dasarnya permasalahan sosial tidak berdiri sendiri atau ada hubungan atau kausalitas yang dinamis. Oleh karena itu struktur organisasi dan tugas-tugas pokok pada masing-masing bagian tersebut diatas mendiskripsikan saling keterkaitan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial serta pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Fungsi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial serta pelayanan dan rehabilitasi sosial merupakan langkah awal yang akan ditindaklanjuti oleh bagian teknis operasional. Pada bagian teknis operasional prinsip-prinsip teknis developmental, partisipatif dan preventif yang diemban oleh bagian Pemberdayaan Sosial merupakan upaya pengembangan dan peningkatan modal sosial. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya masyarakat

mengalami hambatan-hambatan sehingga potensi dan modal sosial masyarakat tidak berperan optimal. Maka fungsi pelayanan dan rehabilitasi sosial serta bantuan dan jaminan sosial memberikan layanan kepada masyarakat atas dasar prinsip praktek teknis, kuratif, rehabilitatif dan asistensi.

Dengan pola pelaksanaan tugas sebagaimana diuraikan diatas, ditetapkan methode pendekatan komprehensif integratif atau holistik. Artinya, cara pandang dan penanganan masalah kesejahteraan sosial tidak parsial. Dengan demikian sinergisitas organisasi pada Dinas Sosial sangat perlu dan telah berjalan sejak lama. Sinergitas ini pula diperlukan oleh atas lembaga pelaksana layanan kesejahteraan sosial tingkat Kabupaten/Kota.

Adapun jumlah Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per Desember 2017 berjumlah **236 orang**, dengan susunan sebagai berikut

**a. Jumlah Pegawai per Bidang dan UPTD :**

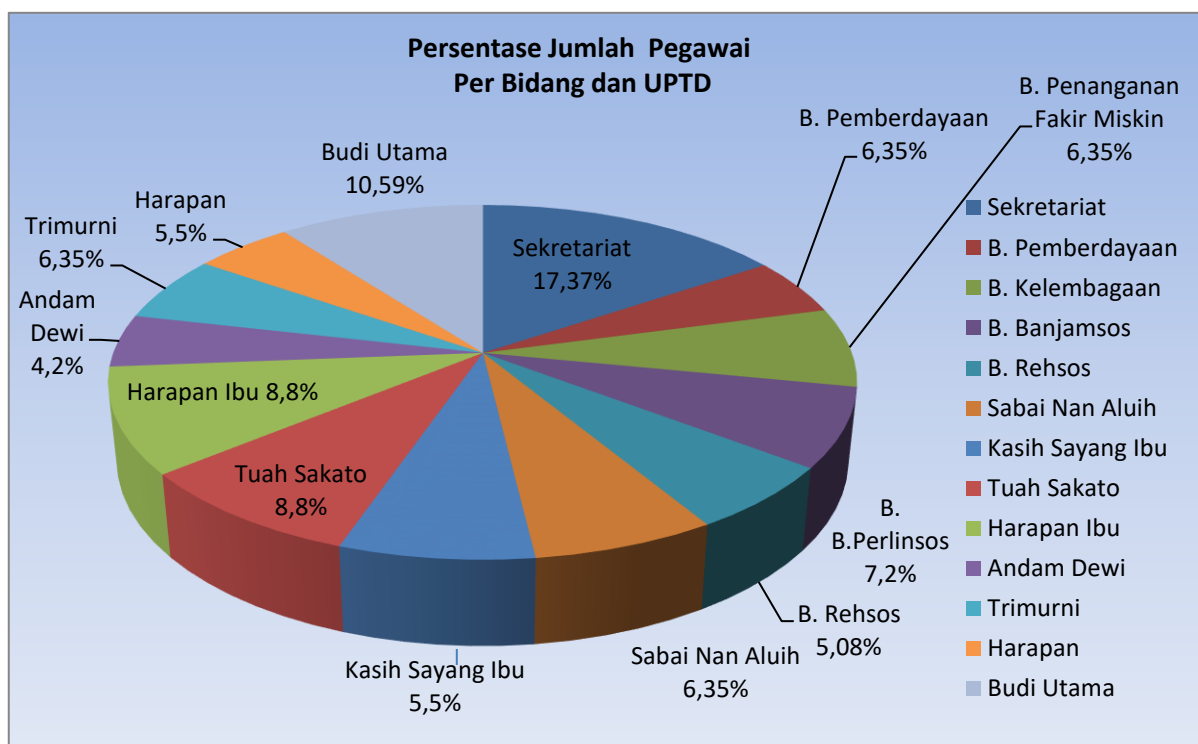
**Tabel 1.**

**Jumlah Pegawai per Bidang dan UPTD**

NO	BIDANG	JUMLAH
1	Sekretariat	41 orang
2	Bidang Pemberdayaan Sosial	15 orang
3	Bidang Penanganan Fakir Miskin	15 orang
4	Bidang Rehabilitasi Sosial	12 orang
5	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	17 orang
6	UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	15 orang
7	UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak Batu Sangkar	13 orang
8	UPTD PSBN Tuah Sakato Padang	21 orang

9	UPTD PSBG Harapan Ibu Padang	21 orang
10	PSKW Andam Dewi Sukarami Solok	10 orang
11	PSAA Trimurni Padang Panjang	15 orang
12	PSBR Harapan Padang Panjang	13 orang
13	PSAABR Budi Utama Lubuk Alung	25 orang
14	Fungsional Dinas	3 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>236 orang</b>

Tabel di atas dapat disajikan dalam diagram berikut :

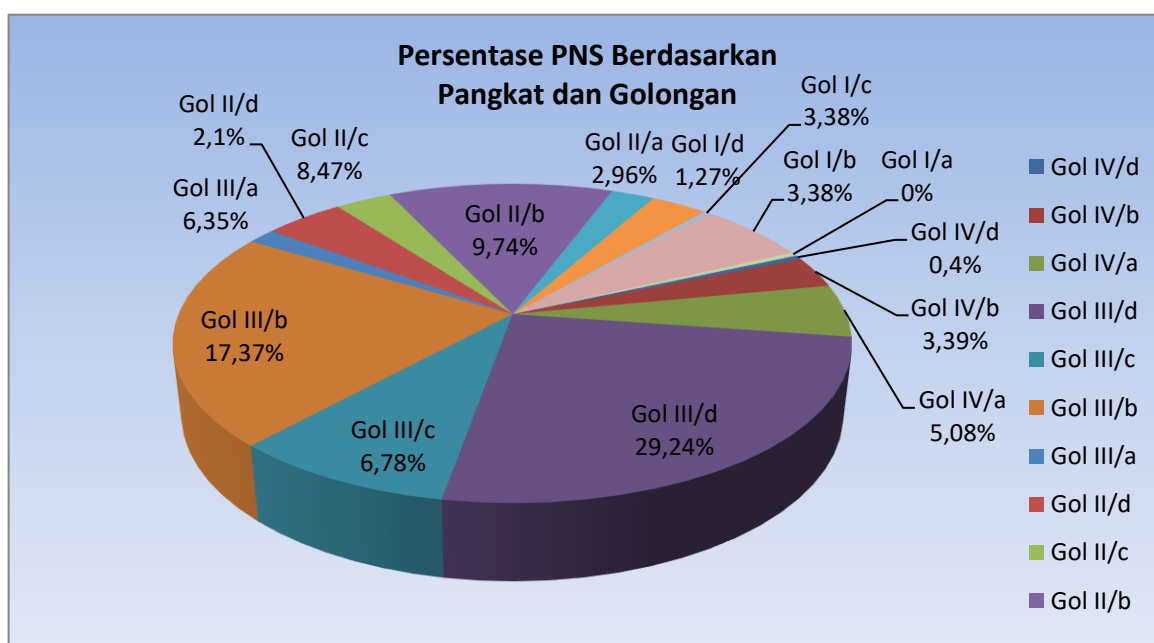


b. Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan :

**Tabel 2.**  
**Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	I/a	-
2	I/b	8 orang
3	I/c	8 orang
4	I/d	3 orang
5	II/a	7 orang
6	II/b	23 orang
7	II/c	20 orang
8	II/d	5 orang
9	III/a	15 orang
10	III/b	41 orang
11	III/c	16 orang
12	III/d	69 orang
13	IV/a	12 orang
14	IV/b	8 orang
15	IV/c	-
16	IV/d	1 orang
17	IV/e	-
	<b>Jumlah</b>	<b>236 orang</b>

Tabel di atas dapat juga disajikan dalam diagram berikut :



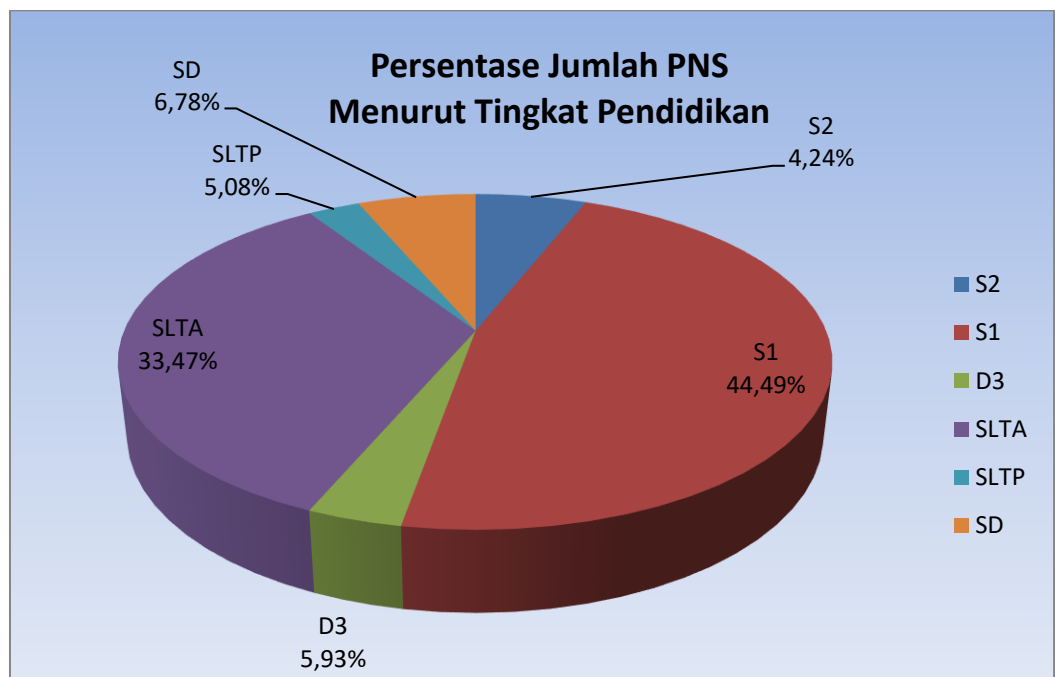


c. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

**Tabel 3.**  
**Jumlah Pegawai pada Dinas Sosial Prov.Sumbar**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	16 orang
2	SLTP	12 orang
3	SLTA	79 orang
4	DIII	14 orang
5	S1	105 orang
6	S2	10 orang
<b>Jumlah</b>		<b>236 orang</b>

Tabel di atas dapat juga disajikan dalam diagram berikut :



### 6.3 Aspek Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai SKPD Teknis pada Pemerintah Daerah, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas yang cukup berat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Barat.

Daerah Sumatera Barat merupakan daerah yang sangat rawan bencana seperti longsor, banjir, gempa dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan masyarakatnya terkena musibah/masalah. Salah satunya menyebabkan kehilangan pekerjaan, tempat tinggal dan lain-lain sebagainya yang dapat menyebabkan juga tingkat perekonomiannya menjadi terganggu

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga pemerintah yang menangani permasalahan sosial di Sumatera Barat mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam rangka meningkatkan fungsi sosialnya secara wajar sehingga kesejahteraan sosialnya meningkat.

Situasi dan kondisi yang terdiri dari sejumlah faktor yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya dapat disebut sebagai kekuatan penghambat. Sekalipun demikian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat juga memiliki faktor positif yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan pendorong peningkatan kinerja masyarakat. Untuk mendukung analisis selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4 yang mengidentifikasi beberapa aspek strategis sebagai faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 4.

## Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan

## Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

FAKTOR INTERNAL	
<b>Kekuatan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peraturan dan perundang-undangan.</li> <li>2. Adanya Aparatur/Sumber Daya Manusia</li> <li>3. Adanya sarana dan prasarana yang tersedia</li> <li>4. Adanya dana.</li> </ol>	<b>Kelemahan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan dan perundang-undangan yang mendukung perlu disempurnakan.</li> <li>2. SDM aparatur masih belum profesional dan optimal</li> <li>3. Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai untuk mendukung kelancaran tugas.</li> <li>4. Belum jelasnya sistem pembinaan karir aparatur.</li> </ol>
FAKTOR EKSTERNAL	
<b>Peluang :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial dalam upaya pembinaan masyarakat dilokasinya dalam meningkatkan fungsi sosialnya/ kesejahteraan sosialnya.</li> <li>2. Berperannya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat dalam membantu penanganan berbagai permasalahan sosial masyarakat ditengah kehidupan masyarakat, dalam mewujudkan kerukunan dan kedamaian hidup bermasyarakat.</li> </ol>	<b>Ancaman :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan teknis kepada masyarakat untuk membangun dalam rangka meningkatkan fungsi sosialnya..</li> <li>2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani permasalahannya,</li> <li>3. Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat di daerah (seperti di daerah perkotaan, pedesaan dll) sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial</li> </ol>

## BAB VII

## P E N U T U P

## 7.1 Kesimpulan.

Pada tahun 2017 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dialokasikan 15 (lima Belas ) Program dengan 108 (seratus delapan) kegiatan dengan target capaian kinerja telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA). Dari Jumlah Dana Rp. 52.784.515.122,- terealisasi sebesar Rp. 49.879.182.307,- ( Keuangan sebesar 94,50 % dan fisik sebesar 97,27 % ), yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 19.074.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 18.532.594.292,- ( Keuangan sebesar 97,16 % dan Fisik 100 % ).
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 33.710.115.122,- terealisasi sebesar Rp. 31.346.588.015,- ( Keuangan sebesar 92,99 % dan Fisik 95,72 % ).

Secara total dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, sehingga target fisik capaian kinerja tidak tercapai 100 % seperti yang diharapkan.

Adapun Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan Kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90% dimana sisa anggaran yang tidak terpakai lagi, dengan kegiatannya sebagai berikut:

1. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan :

No	Uraian			Anggaran
1.	Program	:	Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kessos (PMKS) Lainnya	5.636.736.091,-
	Kegiatan	:	- Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	1.526.159.085,-

2. Kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90%, tetapi secara fisiknya tercapai 100%, rinciannya sebagai berikut :

No	Uraian			Anggaran
1.	Program	:	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.055.573.241,-</b>
	Kegiatan	:	-Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	854.610.000,-
			-Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	200.963.241,-
2.	Program	:	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>73.117.000,-</b>
	Kegiatan	:	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	18.200.000,-
			- Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	54.917.000,-
3.	Program	:	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>51.326.000,-</b>
	Kegiatan	:	- Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51.326.000,-
4.	Program	:	<b>Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>142.813.060,-</b>
			- Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	95.110.460,-
			- Penyusunan Peraturan Gubernur dan Sosialisasi Perda Disabilitas	47.702.600,-
5.	Program	:	<b>Pembinaan Anak Terlantar</b>	<b>40.018.900,-</b>
			Tim PIPA ( Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak )	40.018.900,-
6.	Program	:	<b>Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>564.500.000,-</b>
			-Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat	378.500.000,-
			- Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial	186.000.000,-

6.	Program	:	Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	36.099.700,-
			Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan NAPZA	36.099.700,-
Jumlah				1.963.447.901,-

## 7.2 Saran

1. Perlunya perencanaan anggaran yang lebih baik di dalam Penyusunan Anggaran, sehingga dalam penggunaan dana dapat lebih optimal sesuai dengan dana yang tersedia dan rencana pelaksanaan.
2. Perlunya ditingkatkan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pengadaan Barang dan Jasa terhadap pengelola keuangan dan Pejabat Pengadaan, sehingga permasalahan dalam proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar.
3. Perlu penambahan tenaga akuntansi, karena terbatasnya tenaga tersebut sehingga penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sedikit mengalami hambatan.

Demikian laporan keuangan ini dibuat semoga bermanfaat dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di tingkat Provinsi, dan bermanfaat bagi kita semua terutama dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat.



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL



## LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2017 AKRUAL